

i s u - i s u

Demokrasi



KONSTITUSIONALISME
DAN
DEMOKRASI
YANG SEDANG BANGKIT

isu-isu

Demokrasi

Konstitusionalisme dan Demokrasi
yang sedang Bangkit

Respon terhadap Perubahan oleh Konstitusionalisme dan Demokrasi yang sedang Bangkit

Dari Editor

PERASAAN optimistik tidak bisa disembunyikan di antara para delegasi yang menghadiri pertemuan konstitusi. Para pembesar, warga biasa, akademisi, ulama dan tokoh-tokoh masyarakat—sebagian besar dipilih oleh konstituennya masing-masing untuk mewakili mereka berkumpul—untuk sebuah kegiatan bersejarah. Kesepakatan mengenai struktur pemerintahan dan sebuah konstitusi yang menjamin aspek-aspek, di antaranya, hak bagi semua, kebebasan beragama, dan peradilan yang mandiri. Tinta ditorehkan di atas kertas, tanda tangan dikumpulkan, dan sebuah dokumen sederhana menjadi secercah harapan di tanah yang sebelumnya berada di bawah tirani. Tempat kejadian bukan di Philadelphia pada 1787 atau Warsawa pada 1791; Tempat kejadian ini berada di Afghanistan pada 2003 saat Pashhtuns, Tajks, Hazaras, Uzbeks, dan wilayah lain yang mewakili begitu banyak masyarakat Afghanistan yang beragam, bertempat di Loya Jirga guna menyepakati sebuah konstitusi baru.

Tetapi titik yang menentukan ini dalam konstitusionalisme bukanlah yang terkini. Ketika para anggota Dewan Pemerintahan Irak menandatangani Undang-Undang Administrasi Transisi, yang membentuk kerangka hukum bagi transisi Irak menuju pemerintahan berdaulat yang dipilih secara demokratis, negara mereka bergabung dengan keluarga bangsa-bangsa yang diperintah oleh hukum. Konstitusi sementara—yang merupakan Konstitusi pertama kali bagi Irak—menjamin hak-hak dasar bagi semua warga Irak termasuk wanita dan memahat kebebasan yang telah lama dihargai oleh demokrasi di dunia.

Dalam jurnal ini kami mencoba untuk menyajikan kepada pembaca perspektif tentang konstitusionalisme, komponen-komponen penting dari konstitusi yang berhasil, dan pengalaman berbagai negara sepanjang sejarah dalam membuat konstitusi yang sesuai hanya untuk mereka. Di antara pengarang yang memberi kontribusi tulisannya adalah beberapa pejabat Amerika

terkemuka di bidang undang-undang konstitusi. Kami secara khusus merasa tersanjung memasukkan sambutan hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat. Konstitusi AS berfungsi sebagai sumber inspirasi bagi para perumus konstitusi di seluruh dunia, maka kita akan mulai dengan tulisan yang menjelaskan mengapa ia menjadi “Ekspor paling penting Amerika” seperti yang disebut oleh Albert Blaustein.

Hakim Anggota Mahkamah Agung Sandra Day O'Connor, dalam sambutannya di Forum Yudisial Arab, menguraikan pentingnya peradilan yang bebas atas kekuatan aturan demokratis dan upaya-upaya di dunia Arab untuk memastikan kemandirian yudisial. Cendekiawan konstitusional A.E. Dick Howard dan Herman Schwartz membagi pengalaman mereka sebagai penasihat perumus konstitusi di seluruh dunia dalam tulisan mereka mengenai komponen dasar konstitusi dan Konstitusi Amerika yang terus memberi peran penting. Cendekiawan Vivien Hart mengaitkan pengalaman Afrika Selatan dan bagaimana proses pembangunan konstitusi menjadi kekuatan yang menyatukan di negara yang pernah secara tajam membuat pemisahan garis rasial. Kami akhiri dengan diskusi dengan cendekiawan bidang hukum terkemuka Noah Feldman yang menghubungkan pengalaman pribadinya dengan dokumen konstitusi yang baru dibentuk di Irak dan Afghanistan, termasuk penilaian mengenai keselarasan Islam dan demokrasi konstitusional.

Seiring dengan menyebarnya demokrasi ke seluruh penjuru dunia, para penyusun konstitusi di masa depan akan melihat pada konstitusi yang telah ada sebagai panduan. Mereka harus selalu ingat bahwa tidak ada

model sederhana dan tidak ada satu kerangka yang secara keseluruhan bisa diterapkan ke semua negara. Kami mengundang pembaca untuk terus menggali topik bahasan yang dinamis ini dengan mengunjungi link (situs) yang dapat dilihat di bab sumber-sumber. Kami harap jurnal ini akan memancing diskusi di antara para pembaca mengenai sifat demokrasi dan peran konstitusi di dalamnya.

D a f t a r I s i

isu-isu Demokrasi

7

KONSTITUSI AMERIKA: EKSPOR TERPENTING AMERIKA

Dalam tulisan ini Albert Blaustein, yang mengajar di Rutgers School of Law dan menulis karya berisi enam jilid mengenai Konstitusi AS, menguraikan bagaimana dokumen tersebut digunakan sebagai model oleh pemerintahan lain dalam merumuskan konstitusi mereka. Artikel yang ditulis untuk memperingati 200 tahun Konstitusi A.S. itu, tetap menjadi penilaian klasik pada daya tarik dokumen politik mendasar Amerika bagi perjuangan negara untuk mencapai demokrasi dari abad ke delapan belas sampai abad ke dua puluh satu.

13

KOMPONEN DASAR UNTUK KONSTITUSI

Herman Schwartz, seorang guru besar di American University's Washington College of Law, membahas keputusan dasar yang harus dibuat dalam soal bentuk pemerintahan yang diinginkan sebelum perumusan sebuah konstitusi dimulai. Karakteristik utama seperti sistem pemerintahan, peninjauan yudisial, dan perlindungan hak-hak minoritas harus diperhatikan dan diputuskan sebelum pena ditorehkan di atas kertas.

20

MENUJU DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DI SELURUH DUNIA: SEBUAH PERSPEKTIF AMERIKA

A.E. Dick Howard, guru besar hukum di The University of Virginia dan sering menjadi konsultan dalam revisi konstitusi, membahas mengenai apa yang bisa diambil dari model Amerika oleh negara-negara di Eropa Tengah dan Timur dan di seluruh dunia dan bagaimana kebudayaan unik dan kondisi politik setiap negara membawa mereka ke jalur konstitusi yang berbeda.

28

PENTINGNYA KEMANDIRIAN YUDISIAL

Hakim Anggota Mahkamah Agung O'Connor membuat presentasi ini pada Forum Yudisial Arab baru-baru ini di Bahrain. Dalam presentasinya dia memperlihatkan bahwa kemandirian yudikatif adalah unsur terpenting dalam keberhasilan pemerintahan yang konstitusional dan membuat acuan khusus ke konstitusi negara-negara di kawasan tersebut yang menjamin kemandirian yudikatif. O'Connor juga membahas cara-cara bagaimana sistem yudisial AS melindungi para hakim dari politik.

34

PENYUSUNAN KONSTITUSI DEMOKRATIS:

PENGALAMAN AFRIKA SELATAN

Dalam laporannya yang terbaru dari the U.S. Institute of Peace "Democratic Constitution Making,"

Profesor Vivian Hart menganalisa praktik-praktik baru penyusunan konstitusi di seluruh dunia, khususnya dalam masyarakat yang terbelah di mana proses konstitusional adalah sebuah cara untuk mendamaikan perbedaan, menegosiasikan konflik, dan memperbaiki keluhan.

Dia juga membahas proses konstitusional di Afrika Selatan sebagai panutan.

38

KONSTITUSIONALISME DI DUNIA ISLAM:

PERBINCANGAN DENGAN NOAH FELDMAN

Noah Feldman yang mengajar hukum di New York University, berpartisipasi dalam penyusunan konstitusi baru di Afghanistan dan dimintai pendapatnya dalam pengembangan Undang-Undang Administrasi Transisi Irak yang ditandatangani belum lama ini.

Dia membahas beberapa isu unik yang dihadapi oleh para penyusun rancangan konstitusi di negara yang terkoyak oleh perang dan perjuangan seberapa banyak pengaruh hukum syariah dalam demokrasi yang sedang bangkit ini.

45

DAFTAR PUSTAKA

Bacaan lebih lanjut tentang konstitusionalisme.

47

SITUS-SITUS INTERNET

Situs-situs Internet tentang konstitusionalisme.

ISU-ISU DEMOKRASI

KONSTITUSIONALISME DAN DEMOKRASI

YANG SEDANG BANGKIT

EDITOR	Leslie High	PENERBIT	Judith Siegel	DEWAN EDITOR	George Clack
EDITOR PELAKSANA	Mark Betka	EDITOR EKSEKUTIF	Guy E. Olson		Kathleen R. Davis
SPELIALIS RUJUKAN	Anita Green	MANAJER PRODUKSI	Christian Larson		Francis B. Ward
	Lorna Dods	ASIST. MANAJER PRODUKSI	Sylvia Scott		
PENGARAH SENI	Diane Woolverton				
ASISTEN GRAFIS	Sylvia Scott				

Biro Program Informasi Internasional dari Departemen Luar Negeri A.S. menyediakan produk dan layanan yang menjelaskan kebijakan-kebijakan, masyarakat dan nilai-nilai A.S. kepada khalayak luar negeri. Biro ini menerbitkan lima jurnal elektronik yang mengkaji isu-isu utama yang dihadapi oleh Amerika Serikat dan komunitas internasional. Jurnal-jurnal ini—Perspektif Ekonomi, Isu-Isu Global, Isu-Isu Demokrasi, Agenda Kebijakan Luar Negeri A.S. dan Masyarakat dan Nilai-Nilai A.S.—memberikan pernyataan tentang kebijakan A.S. bersama dengan analisa, komentar dan informasi latar belakang dalam bidang-bidang tematik mereka. Semua edisi muncul dalam versi-versi bahasa Inggris, Prancis, Portugis, dan Spanyol, dan edisi-edisi khusus juga muncul dalam bahasa Arab dan Rusia. Edisi-edisi berbahasa Inggris muncul dengan selang waktu sekitar satu bulan. Versi-versi terjemahan biasanya mengikuti versi asli bahasa Inggris dalam dua hingga empat minggu. Pendapat-pendapat yang dilukiskan dalam jurnal-jurnal tidak mesti mencerminkan pandangan atau kebijakan dari pemerintah A.S. Departemen Luar Negeri A.S. tidak bertanggung jawab untuk isi dan akses tetap ke situs-situs Internet yang dihubungkan di sini; tanggung jawab tersebut semata-mata terletak pada penerbit dari situs-situs tersebut. Artikel-artikel dapat direproduksi dan diterjemahkan di luar Amerika Serikat kecuali artikel-artikel yang mengandung pembatasan hak cipta yang eksplisit untuk penggunaan demikian. Calon pengguna dari foto-foto di sini diwajibkan untuk memperoleh izin dari sumber tersebut. Edisi-edisi sekarang atau lalu, dan daftar jurnal mendatang, dapat ditemukan pada situs web Kantor Program Informasi Internasional di <http://usinfo.state.gov/journals/journals.htm>. Edisi-edisi ini tersedia dalam beberapa format elektronik untuk mempermudah melihat secara on-line, mentransfer, mendownload, dan mencetak. Komentar dapat disampaikan ke Kedutaan Besar A.S. di tempat anda atau kantor editor: Editor, Issues of Democracy, Democracy and Human Rights—IIP/T/DHR, U.S. Department of State, 301 4th Street, S.W., Washington, D.C. 20547, United States of America.

e-mail: ejdemos@state.gov

Konstitusi Amerika

Ekspor Terpenting Amerika

Oleh Albert P. Blaustein

Pendiri Bangsa Amerika merumuskan konstitusi tertulis pertama dunia lebih dari 200 tahun yang lalu. Warisan dari dokumen bersejarah tersebut tampak jelas dalam konstitusi sebagian besar demokrasi di seluruh dunia dewasa ini, dan konstitusi tersebut terus mempengaruhi para perumus konstitusi yang paling mutakhir. Dalam merayakan dokumen yang penting ini, cendekiawan konstitusional terkemuka membahas bagaimana model Philadelphia membantu mengubah dunia dan bagaimana ia menjadi model bagi pemerintahan yang demokratis.

KONSTITUSI AS adalah ekspor terpenting Amerika. Dari awal pembenihannya, pengaruh konstitusi tersebut dapat dirasakan di seluruh penjuru dunia. Dan meskipun pengaruh tersebut tidak menghasilkan demokrasi dan kebebasan, tapi ia masih membawa harapan—seperti yang diungkapkan Presiden Abraham Lincoln—pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.

Cerita pengaruh tersebut adalah dongeng yang sangat berharga untuk diceritakan. Pendiri bangsa Amerika¹ membuat sebuah konstitusi yang merupakan terobosan unik dalam perjuangan yang terus berlanjut untuk kebebasan manusia. Para pendiri tersebut percaya pada prinsip pemerintahan yang konstitusional, yang mereka harap akan memberi relevansi hingga ke luar Amerika. Thomas Jefferson memandang Konstitusi sebagai monumen yang berdiri dan contoh permanen bagi rakyat lain. “Adalah mustahil” tulisnya, “untuk tidak [merasakan] bahwa kita bertindak untuk semua umat manusia.” Presiden John Adams yakin bahwa gagasan



Lukisan Jan Matejko The Constitution of May 3rd, 1971 menggambarkan Konstitusi Polandia yang baru diacungkan tinggi oleh Raja Stanisław August Poniatowski. Beliau dipanggul dari the Royal castle, tampak di latar belakang dan tempat di mana konstitusi tersebut digantungkan saat ini, ke Katedral Santo John, Warsawa.

politik Amerika akan sangat mempengaruhi negara-negara lain. Alexander Hamilton berpikir bahwa sudah menjadi hak rakyat Amerika untuk menentukan pertanyaan apakah masyarakat sendiri benar-benar mampu membentuk pemerintah yang baik. James Madison, presiden dan penulis pada *Federalist Papers*, meyakini bahwa anak cucu akan berhutang pada Pendiri Bangsa untuk pencapaian politik mereka dan untuk prinsip-prinsip pemerintahan yang nyata yang diberikan untuk Konstitusi AS.

Maka adalah Pendiri Bangsa yang menjadi guru mengapa dan (yang terpenting) bagaimana konstitusi harus ditulis. Siswa utamanya adalah Prancis. Misalnya The Marquis de Lafayette, yang mengagumi Jefferson, seperti juga para kritikus lainnya di rezim Prancis lama. (Muncul rancangan Deklarasi Prancis 1789 tentang Hak-Hak Manusia dan Warga Negara—secara umum dianggap sebagai salah satu dokumen hak azasi manusia terpenting yang pernah dirumuskan—dengan tulisan tangan Jefferson mengedit di margin). Para cendekiawan Prancis mengerubuti Gu-

bernur Morris, arsitek utama Konstitusi AS [yang mendapat pujian dengan menuliskan mukadimah 'kami Rakyat Amerika Serikat, dalam rangka membentuk Perserikatan yang lebih sempurna....'] ketika ia mengunjungi Prancis.

Tetapi, bukan hanya rakyat Prancis yang mengagumi para Pendiri Bangsa. Konstitusi Polandia yang diterapkan pada 3 Mei, 1791, mendahului dokumen konstitusi Prancis empat bulan. Penelitian piagam Polandia—dimulai dengan mukadimahnya—memastikan digunakannya model Amerika. Selain itu, ada catatan mengenai konsultasi soal konstitusi Amerika dengan cendekiawan Jerman, Austria, Belgia, Belanda, Spanyol, dan Portugis dan dengan para pemimpin dari Dunia Baru. Salah satu pemimpin gerakan revolusi Brazil, Mason Jose Joaquin de Maia, bertemu dengan Jefferson untuk berdiskusi masalah konstitusi.

Penyebaran Konstitusionalisme

Sejak hari ke tujuh belas September 1787, satu dokumen konstitusi telah dianggap sebagai ciri terpenting dari keberbangsaan. Dewasa ini, dari 192 negara merdeka di dunia, hampir semua mempunyai sebuah konstitusi atau yang berkomitmen untuk mempunyai sebuah konstitusi. Pengecualian adalah Inggris Raya, Selandia Baru, dan Israel—negara demokratis dengan jurisprudensi konstitusi yang canggih namun tidak punya dokumen khusus yang bisa disebut sebagai konstitusi. Konstitusi negara-negara ini, yang berkomitmen pada prinsip supremasi parlemen, terdiri dari berbagai undang-undang yang secara khusus dirancang sebagai 'Undang-Undang Dasar' (di Israel) atau studi hukum yang diklasifikasikan sebagai utama atau alami.

Konstitusi Amerika Sebelum 1787

Sejarawan umumnya setuju bahwa konstitusi pertama yang memasukkan bahasa yang menciptakan entitas pemerintahan, politis adalah Fundamental Orders of Connecticut pada 1639; dikenal bahwa konstitusi pertama yang menggunakan kata 'konstitusi' adalah Konstitusi Virginia 1776.

Tak lama setelah Deklarasi Kemerdekaan pada 1776, tiga belas bekas koloni Inggris mulai menulis serangkaian konstitusi baru. Lima belas konstitusi diterbitkan antara 1776 dan 1787, enam yang paling signifikan pada 1776. Konstitusi ini mencakup konstitusi Pennsylvania dan Virginia. Kedua dokumen ini menimbulkan minat di luar negeri dan diterjemahkan ke dalam bahasa lain—terutama Prancis—dalam beberapa minggu setelah mereka diumumkan ke publik. Salinan

lain, baik itu dalam bahasa Inggris, Prancis, atau dalam bahasa lain, segera berada di tangan para cendekiawan dari Polandia, Jerman, Austria, Swiss, dan Spanyol, juga dari Meksiko, Venezuela, Argentina, dan Brazil.

Setelah penandatanganan persekutuan antara Prancis dan Amerika Serikat pada 1778, teks konstitusional negara ini, saat itu dikenal dengan nama *Code de la Nature*, diterbitkan di Paris. Pada 1783, menteri Amerika di Paris, Benjamin Franklin, memperoleh otorisasi resmi dari menteri luar negeri Prancis untuk pencetakan *Constitutions des Treize Etats de l'Amerique* di Paris. Pada 1786, setahun sebelum penyusunan rancangan Konstitusi Amerika, filsuf dan ahli matematika Prancis, Marquis de Condorcet, menguraikan gagasannya untuk deklarasi Prancis tentang hak, menulis studi peran ide politik Amerika berjudul *De l'influence de la Revolution a'Aerique sur l'opinion et la legislation de l'Europe*.

Presiden Amerika

Tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa Konstitusi Philadelphia-lah yang menciptakan preseden bagi konstitusionalisme. Pada saat perumusannya dan bahkan sebelum diratifikasi, kuliah tentang Konstitusi AS disampaikan oleh pengacara Jacques Vincent Delacroix di Lycee de Paris, sebuah institusi pendidikan tinggi yang bebas. Jumlah warga asing yang menghadiri kuliah tersebut tidak diketahui, Namun, kuliah tersebut menarik banyak pengikut dan bahwa kursus tersebut menjadi topik artikel penting di *Le Maniteur*, koran terpenting di Prancis. Paris saat itu menjadi ibu kota intelektual Eropa dan pusat studi tentang revolusi dan setelahnya.

Tentu saja, rakyat Belgia adalah di antara rakyat pertama yang merasakan dampak gagasan konstitusi baru, seperti yang dapat dilihat dengan mengamati revolusi Belgia pada 1789. Partai Demokrat Belgia, yang muncul sebentar pada 1790, mencontoh konstitusi negara Amerika sebagai model yang diperjuangkan.

Pengaruh pertama Konstitusi Amerika pada konstitusi nasional terasa dalam dokumen Polandia dan Prancis 1791. Konstitusi Polandia hanya bertahan sebentar. Konstitusi tersebut lenyap dalam serangkaian pemisahan yang pada 1795 mengakhiri keberadaan Polandia sebagai sebuah negara terpisah hingga setelah Perang Dunia I.

Ini berbeda dengan Konstitusi Prancis 1791. Meskipun Konstitusi ini berakhir hanya sebentar dan digantikan oleh Konstitusi Prancis 1793 dan 1795, sumber terbesarnya terasa di Spanyol. Piagam Prancis yang diilhami Amerika digunakan sebagai dasar Konstitusi Cadiz 1812, konstitusi Spanyol pertama. Nantinya, konstitusi ini membentuk fondasi Konstitusi Portugis 1822. Konstitusi Iberian ini diperkenalkan kepada Simon Bolivar dan pahlawan Amerika Latin lain dan juga sangat penting untuk persiapan konstitusi negara-negara baru Amerika.

Pada 1784, Francisco de Miranda mengembangkan sebuah 'proyek untuk pembebasan dan kemerdekaan seluruh benua Amerika Spanyol' dan mencari bantuan para ahli konstitusi Amerika Utara terkemuka dalam upayanya. Karena gagal untuk memperoleh dukungan yang cukup, dia pergi ke London dan mengejar karier di bisnis selama lebih dari dua dekade. Dia kembali ke Venezuela pada 1810 untuk bekerja pada Bolivar untuk mendirikan pemerintahan Ame-

rika Latin berdasarkan pada Konstitusi AS. Sejarah menceritakan pada kita bahwa Venezuela, Argentina, dan Chile membentuk konstitusi pertama mereka pada 1811, satu tahun sebelum Konstitusi Cadiz milik Spanyol. Semuanya berdasarkan, dalam beberapa bagian, pada model Philadelphia.

Konstitusi Amerika juga mempengaruhi perkembangan federalisme Amerika Latin. Venezuela dan Argentina adalah negara federal seperti juga Meksiko dan Brazil, di mana piagam kedua negara tersebut dibentuk pada 1824.

Konstitusi Amerika juga dikagumi di Afrika. Liberia, yang dihuni oleh para budak dari Amerika Serikat yang telah dibebaskan, menerapkan sebuah konstitusi pada 1847, yang sebagian besar ditulis oleh seorang guru besar dari Sekolah Hukum Harvard.

Presiden AS menjadi inspirasi sekaligus juga model bagi Konstitusi Eropa yang mengikuti revolusi 1848. Pada tahun ini, perkembangan konstitusional penting pertama terjadi di Austria dan Italia, dan konstitusi baru disahkan di Prancis dan Swiss. Tahun itu juga merupakan tahun dibuatnya Konstitusi Frankfurt yang tidak pernah diterapkan. Ia digunakan dalam bentuk yang telah dimodifikasi untuk Konstitusi Jerman nantinya, seperti konstitusi yang dirancang untuk Jerman dan yang membentuk Republik Weimar pada 1919.

Kolonialisme Amerika membawa ke perkembangan konstitusional lebih jauh pada pergantian abad. Kuba, Panama, dan Filipina semuanya menerapkan piagam nasional bergaya Amerika. Kolonialisme juga kentara pada konstitusi Haiti pada pra-Perang Dunia I, dikenal ditulis oleh Asisten Sekretaris Angkatan Laut saat itu, Franklin D. Roosevelt.

Sejauh ini konstitusi terpenting pada periode Perang Dunia I adalah milik Meksiko, yang diterapkan pada 1917. Meskipun sering diabaikan, konstitusi ini masih ada, dan membuatnya sebagai salah satu konstitusi bersejarah yang pernah dirancang. Ini adalah konstitusi pertama yang mengakui hak-hak ekonomi dan budaya serta politik. Struktur bagian dalamnya dan kebanyakan bahasanya diambil langsung dari Konstitusi Philadelphia. Juga antara [dua] perang dunia banyak bangsa-bangsa Amerika Latin menulis kembali Konstitusi mereka, dan model Philadelphia sangat kentara dalam semua konstitusi tersebut. Konstitusi Chile dan Uruguay merupakan contoh yang luar biasa.

Dengan berakhirnya Perang Dunia II, pengaruh Amerika begitu dominan dalam persiapan piagam dasar baru Jerman Barat dan Jepang. Konstitusi India 1949, meskipun kurang dipublikasikan namun tetap signifikan, mengikuti model Philadelphia. Salinan laporan Mahkamah Agung AS tersedia bagi hakim Mahkamah Agung India, di mana mereka tidak hanya membacanya bahkan sering mengutipnya.

Studi konstitusionalisme Amerika setelah Perang Dunia II mengarah ke kepentingan yang nyaris universal dalam hal peran Mahkamah Agung AS dalam menentukan konstitusionalitas perundangan. Fungsi ini diterapkan oleh Mahkamah Agung India dan juga Mahkamah Agung Australia serta oleh negara-negara lain yang menerapkan sistem *common-law*. Peninjauan konstitusional tidak bisa diterapkan oleh negara-negara Amerika Latin karena struktur yudisial mereka berdasarkan pada sistem hukum sipil. Walaupun demikian, negara-negara ini ingin memasukkan proses peninjauan peradilan. Maka solusinya adalah

pembentukan pengadilan konstitusi. Pengadilan konstitusi yang pertama dibentuk di Jerman dan Italia, dan kemudian mereka menyebar ke seluruh dunia. Pengadilan Konstitusi Polandia (dibentuk pada 1980-an) adalah pengadilan konstitusi pertama di negara-negara komunis. Brazil, yang merancang sebuah konstitusi baru pada 1988, mempelajari kembali sistem peradilan guna menetapkan apakah peradilan menempatkan peninjauan peradilan di dalam wilayah mahkamah agungnya atau membentuk pengadilan konstitusi.

Efek Konstitusi Philadelphia terus terlihat. Nigeria, negara dengan penduduk terbanyak di Afrika, telah melepaskan sistem parlementer yang diwarisi dari Inggris dan yang disatukan ke dalam Konstitusi Kemerdekaannya. Pada 1999, Nigeria mengadopsi konstitusi baru yang mencerminkan pemerintahan presidensial dan mengakhiri kekuasaan militer selama bertahun-tahun. Pengaruh Amerika juga kentara pada Konstitusi Kanada dan Honduras pada 1982, El Salvador pada 1983, Liberia pada 1984, Guatemala pada 1985, dan Filipina pada 1987.

Memahami Pengaruh Amerika

Semua hal ini mengarah ke pertanyaan: Mengapa Konstitusi Amerika begitu berpengaruh? Sebagai awal, Konstitusi Amerika adalah konstitusi pertama dan oleh karenanya menjadi preseden yang jelas bagi semua penyusun konstitusi setelahnya. Sebagian besar penulis konstitusi adalah ahli hukum, dan sudah pasti ahli hukum akan mencari preseden. Sejak awal, banyak pendapat mengenai Konstitusi Amerika yang diterbitkan juga dipelajari dan dibahas oleh para ahli hukum di seluruh dunia.

Para Pendiri Bangsa Amerika percaya akan republik terbatas secara konstitusional dan mereka berhasil dalam membangun sebuah pemerintahan yang memberi keseimbangan pada perintah dan kebebasan. Hal ini telah mendorong banyak sekali orang asing datang ke negara kita untuk mempelajari pemerintahan gaya Amerika dan kembali ke Tanah Air untuk menggalakkan aspek-aspek tertentu dari pemerintahan gaya Amerika tersebut. Dalam banyak kasus, hal ini dimungkinkan dengan disediakannya beasiswa oleh yayasan-yayasan dan universitas Amerika dan oleh hibah yang diberikan oleh pemerintah Amerika. Dalam kategori ini harus juga ditambahkan orang asing yang datang ke Amerika untuk tujuan lainnya dan juga terinspirasi oleh konstitusionalisme Amerika. Ini dimulai oleh warga Prancis, Lafayette, dan warga Polandia, Tadeuz Kosciuszko, keduanya adalah perwira di Angkatan Bersenjata Washington yang nantinya menjadi pemimpin perjuangan kemerdekaan negara mereka.

Demikian juga, pengaruh Konstitusi AS disebarkan ke luar negeri oleh warga Amerika yang diminta untuk bertindak sebagai penasihat dalam pembuatan konstitusi negara lain. Warga Amerika telah membantu rancangan konstitusi Liberia, Meksiko, Jerman, Jepang, dan Zimbabwe. Cendekiawan Amerika juga menyumbangkan gagasan bagi reformasi konstitusi di Filipina (dan belum lama ini di Eropa Tengah dan Timur serta Timur Tengah).

Tetapi, penyebab utama pengaruh Konstitusi Philadelphia di luar negeri dapat disarikan dalam satu kata:—keberhasilan. Amerika adalah negara termakmur, paling bebas dan paling berpengaruh di dunia, dengan kons-

titusi yang umurnya paling tua. Di urutan kedua tertua adalah Konstitusi Belgia, sejak 1831, diikuti oleh Norwegia, sejak 1841. Hanya ada empat negara yang konstitusinya ditulis sebelum abad ke dua puluh: Argentina pada 1853, Luksemburg pada 1868, Swiss pada 1878, dan Kolombia pada 1886. Tujuh konstitusi lainnya dibuat sebelum Perang Dunia II.

Konstitusi Amerika telah mampu teruji oleh waktu. Penelitian konstitusi Amerika adalah proyek besar di setidaknya lusinan negara, sementara nilai-nilainya dianalisa untuk tujuan penulisan konstitusi baru.

Albert P. Blaustein adalah guru besar hukum di Rutgers (The State University of New Jersey) School of Law. Dia mengarang banyak karya perkuliahan mengenai topik konstitusionalisme termasuk karya sebanyak enam jilid tentang Konstitusi Amerika berjudul Constitution of Dependencies and Special Sovereignities. Blaustein membantu merumuskan lebih dari 40 konstitusi di seluruh dunia dan mengunjungi sebagian besar negara tersebut. Pada 1991, dia membantu menulis konstitusi untuk Republik Rusia. Profesor Blaustein wafat pada 1994.

Pendapat yang dilukiskan dalam artikel ini adalah pendapat penulis dan tidak mesti mencerminkan pandangan atau kebijakan pemerintah A.S.

1. Para individu yang perannya dalam penulisan dokumen-dokumen penting (Federalist Papers, Deklarasi Kemerdekaan, Artikel Konfederasi, dan Konstitusi A.S.) bermuara pada pembentukan Amerika Serikat yang berdasarkan pada cita-cita kemerdekaan dan kebebasan.

Foto di halaman 8: fotografer Maciej Bronarski, atas izin The Royal Castle di Warsawa.

Komponen Dasar untuk Konstitusi

Oleh Herman Schwartz

Herman Schwartz, pengarang terkemuka dan cendekiawan bidang konstitusi, mengkaji tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para penyusun rancangan konstitusi yang terkini di dunia. Schwartz menjelaskan soal komponen dasar utama yang harus dipikirkan oleh para penyusun rancangan konstitusi misalnya struktur pemerintahan, perlindungan hak azasi manusia, dan prosedur amandemen.

MEREKA yang menulis konstitusi untuk negara-negara demokrasi yang sedang bangkit menghadapi tantangan yang memprihatinkan. Pertama, mereka harus menulis sebuah dokumen yang memungkinkan masyarakat untuk memutuskan pertanyaan yang sulit dan bersifat memecah belah secara damai, bahkan kadang-kadang di bawah situasi yang genting. Di saat yang sama mereka harus membentuk perlindungan yang efektif bagi hak azasi manusia, termasuk hak bagi minoritas, untuk tidak sepaham.

Kedua, perpecahan dan konflik biasanya berawal dengan cepat dan untuk menyelesaikannya dapat menimbulkan masalah jangka panjang. Apabila transformasi bisa dinegosiasikan, seperti yang terjadi di bekas blok Soviet, yang kalah akan berusaha memegang sebanyak mungkin kekuasaan yang bisa mereka dapat. Jika perubahan terjadi dengan penggulingan sebuah rezim secara tuntas, seperti di Irak, maka pemenangnya akan mengintai kekuasaan. Kompromi dalam memecahkan perselisihan ini biasanya

dimasukkan ke dalam konstitusi, yang pada jangka panjang bisa mengganggu. Misalnya, kompromi mengenai perbudakan dalam Konstitusi Amerika memungkinkan konstitusi tersebut diadopsi namun pada akhirnya tidak baik bagi bangsa.

Selain itu, sebuah konstitusi ditulis pada suatu waktu tertentu, biasanya saat masyarakat menghadapi masalah-masalah ekonomi, sosial dan masalah lain yang sulit. Ada godaan dan biasanya keharusan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut secepatnya. Tetapi ketentuan yang dibuat untuk secara cepat mengatasi masalah yang ada mungkin bukan solusi yang tepat untuk jangka panjang.

Semua dokumen yang ditulis pada satu waktu dan tempat tertentu dihantui oleh fakta bahwa adalah suatu hal mustahil untuk meramal masa depan —dan masa depan akan selalu berbeda dari apa yang diantisipasi. Maka, para penyusun rancangan konstitusi harus memberikan fleksibilitas kepada pemerintahan masa datang untuk memenuhi berbagai tantangan yang tidak bisa diprediksi dan diramal.

Satu pelajaran dari pengalaman yang nyaris universal adalah bahwa hak azasi manusia harus dilindungi segera secara efektif. Bila rezim otoriter digulingkan, tak bisa dipungkiri masyarakat mengalami rasa pembebasan dan keinginan kuat untuk bebas. Tetapi rasa kegembiraan luar biasa tidak berlangsung lama. Pengalaman di negara demokrasi baru dan lama menunjukkan bahwa jika hak azasi manusia tidak dilindungi sejak dari awal, maka ia akan sulit dilakukan kelak.

Pertimbangan Awal

Pertama, apakah sebaiknya konstitusi ditulis oleh badan perundangan biasa atau

oleh majelis konstituen khusus? Apabila yang dipilih adalah yang pertama, para anggota dewan yang masih menjabat dapat menulis konstitusi yang membuat mereka terus berada di kantor. Majelis konstituen khusus yang mewakili sebanyak mungkin elemen dalam masyarakat lebih disukai, meskipun ini lebih membebani dan mahal.

Keputusan awal lainnya adalah tentang perubahan atau mengamandemen konstitusi setelah konstitusi tersebut diterapkan. Bukanlah hal yang mudah untuk melakukannya. Konstitusi harus mencerminkan nilai-nilai terdalam masyarakat dan aturan mendasar bagi proses demokrasi. Aturan tersebut harus stabil. Sebaliknya, karena beberapa ketentuan dihasilkan sebagai akibat dari tekanan, konflik, dan harapan mendesak dari masa awal maka mungkin kurang cocok untuk jangka panjang, membuat perubahan menjadi sulit yang dapat menghambat pemerintah masa depan dalam mengatasi masalah yang tidak diperkirakan secara benar.

Karena alasan inilah, maka sebaiknya melakukan kajian aspek struktural konstitusi setelah periode waktu tertentu. Salah satu cara adalah menyediakan komisi ahli dalam selang waktu sepuluh atau dua puluh tahun untuk menentukan apakah perubahan struktural perlu dilakukan. Hal ini sangat berguna setelah sepuluh tahun pertama, ketika paling tidak sebagian masalah yang berasal dari konstitusi akan kelihatan.

Namun, peninjauan kembali ini sebaiknya tidak menjadikan ketentuan hak azasi manusia melemah meskipun mungkin ada godaan untuk melakukannya. Dengan lunturnya euforia awal dan tidak dirasakannya harapan perbaikan standar kehidupan yang cepat, maka kepedulian akan hak azasi manusia berkurang. Pemimpin dan bahkan masyarakat

mungkin tergoda untuk melihat hak azasi manusia sebagai barang mewah, kurang penting ketimbang stabilitas ekonomi, meskipun pengalaman menunjukkan bahwa hak azasi manusia jarang menghambat respons yang efektif terhadap tantangan-tantangan ini.

Pertanyaan awal yang terkait adalah apakah konstitusi harus pendek atau panjang. Banyak orang di Amerika Serikat percaya bahwa karena Konstitusi kita bertahan selama lebih dari 200 tahun, maka konstitusi yang pendek adalah yang terbaik, bahkan untuk demokrasi yang sedang bertumbuh. Saya tidak sependapat. Undang-undang konstitusi AS tidak bisa ditemukan di dalam teks ketiga puluh empat paragraf asli dan yang telah diamandemen. Ia hanya bisa ditemukan di hampir 540 jilid keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung AS, yang berkuasa dan dibentuk secara kokoh, selama lebih dari 215 tahun. Keputusan-keputusan ini telah membentuk prinsip dan hak-hak konstitusional kita yang paling mendasar, sebagian dapat dibedakan dari teks dasar Konstitusi AS. Namun, demokrasi yang baru, tidak mempunyai kemewahan waktu selama 215 tahun untuk mengembangkan hak-hak ini; walaupun ada, hanya sedikit sekali yang memulai dengan peradilan yang kuat. Mereka bisa dan semestinya membangun berdasarkan pengalaman Amerika dan pengalaman lain, dan menulis hak-hak dan prinsip fundamental ini ke dalam konstitusi mereka tanpa harus menunggu mahkamah.

Ini bukan berarti bahwa konstitusi harus sangat rinci. Konstitusi yang memasukkan terlalu banyak isu dapat menghambat fleksibilitas yang diperlukan. Menentukan isu apa yang masuk ke dalam konstitusi, apa yang sebaiknya dibiarkan bagi para anggota dewan,

dan apa saja yang semestinya tidak perlu diatur sama sekali, merupakan pertanyaan-pertanyaan pertama yang paling mendasar dan sulit.

Komponen Dasar

Yang disebut sebagai isu struktural horizontal dan vertikal adalah isu yang paling sulit karena isu ini menyangkut pembagian kekuasaan. Biasanya isu tersebut dipecahkan di tengah-tengah kontroversi politik, dengan tujuan jangka pendek, khususnya bagaimana memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, yang seringkali dominan.

Isu awal adalah apakah menggunakan sistem presidential atau parlementer. Meskipun masing-masing sistem punya banyak ragam, semuanya dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok. Sistem presidential, di mana sistem Amerika yang paling dikenal, biasanya meliputi pemilihan kepala pemerintahan (chief executive) oleh rakyat baik secara langsung atau, seperti di Amerika Serikat secara tidak langsung, untuk masa jabatan beberapa tahun. Pada model Amerika, presiden, yang berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, menetapkan kebijakan dalam negeri dan luar negeri dan memilih para menteri untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan ini. Para menteri biasanya harus lebih dulu mendapat persetujuan dari anggota dewan, tetapi nantinya mereka tunduk pada aturan dan kendali presiden.

Anggota dewan dipilih secara bebas, dan selama periode tahun tertentu. Biasanya, Presiden tidak bisa memecat anggota dewan, demikian juga sebaliknya. Hal ini menghasilkan legitimasi ganda dan secara jelas memisahkan kekuasaan.

Sistem presidential menawarkan stabilitas dan di tangan seorang presiden yang kuat, dapat menghasilkan kepemimpinan yang tangguh. Tetapi, stabilitas juga bisa berubah ke kekakuan, karena presiden yang tidak populer atau tidak efektif tidak mudah untuk diturunkan sampai masa pemerintahannya berakhir. Selain itu, kebuntuan dan kemacetan legislatif akan terjadi jika anggota dewan dikendalikan oleh partai politik yang berbeda. Jika perpecahan terus terjadi, pemerintah mungkin tidak dapat berfungsi secara efisien selama bertahun-tahun.

Pada sistem parlementer, parlemen adalah satu-satunya sumber legitimasi pemilihan. Tidak ada pembagian kekuasaan antara legislatif dan eksekutif—tentu saja yudikatif berdiri sendiri tetapi ia berada di luar lingkaran legislatif—untuk badan eksekutif, biasanya disebut pemerintah dan dikepalai oleh Perdana Menteri, dipilih oleh partai yang menguasai mayoritas di parlemen atau dari koalisi yang mencerminkan mayoritas para anggota dewan. Kepala negara adalah seorang presiden dengan kekuasaan kecil, dan biasanya dipilih oleh parlemen. Perdana Menteri dan pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen dan parlemen bisa memecat mereka. Pemilu bisa diselenggarakan kapan saja, yang berarti adanya fleksibilitas. Karena tidak ada pemisahan kekuasaan yang resmi antara legislatif dan eksekutif, peluang terjadinya kebuntuan kecil karena pemerintah atau perdana menteri yang kehilangan kepercayaan dari parlemen dapat dipecat oleh parlemen.

Tetapi, sistem parlementer sering dapat menghasilkan pergantian pemerintahan dan ketidakstabilan yang tinggi. Sistem ini juga menghasilkan perubahan kebijakan yang drastis bila oposisi memperoleh mayoritas,

yang dapat menciptakan ketidakstabilan jenis lain.

Tidak ada jawaban yang pasti sistem manakah yang lebih baik. Pilihan biasanya tergantung pada sejarah, kebutuhan momentum, dan faktor-faktor lainnya. Semua negara bekas blok Soviet di luar Uni Soviet, termasuk negara-negara Baltik, mengadopsi pemerintahan parlementer, besar kemungkinan karena mereka ingin menjadi bagian dari Eropa Barat yang hampir seluruhnya menerapkan sistem parlementer. Namun, semua bekas Uni Soviet yang bukan bagian Baltik mengadopsi sistem presidential.

Masalah lain yang harus diputuskan adalah apakah mengadopsi badan legislatif dengan sistem unicameral (kamar tunggal) atau sistem bicameral (kamar tinggi dan rendah). Jika negara tersebut berbentuk negara federal dengan komponen yang relatif bersifat otonomi, seperti Amerika Serikat atau Jerman, maka lebih baik memakai sistem kamar legislatif kedua (biasanya kamar tinggi seperti Senat AS) yang mewakili kepentingan-kepentingan komponen. Kewenangan Kamar kedua biasanya terbatas pada pembuatan keputusan tertentu seperti yang berkaitan dengan perpajakan dan yudisial atau ketentuan-ketentuan lain, atau pada masalah-masalah yang secara langsung mempengaruhi komponen-komponen itu sendiri.

Apabila menggunakan kamar kedua akan menimbulkan pertanyaan tambahan: seberapa sentralkah negara itu nantinya? Berapa banyak wewenang dan otonomi akan diberikan ke pemerintah tingkat lebih rendah seperti daerah atau propinsi? Berapa banyak wewenang kemandirian yang diberikan kepada kota, kabupaten, atau desa? Ada sangat banyak kemungkinan, mulai dari

daerah yang otonom sampai kendali pusat seluruhnya. Alasan yang baik untuk memberikan sebanyak mungkin otonomi kepada pemerintah daerah dan lokal adalah karena mereka bisa mengelola secara efisien, karena pemerintah pusat seringkali kurang mengenal kondisi dan kebutuhan lokal. Selain itu, partisipasi dalam pemerintahan lokal menawarkan pada masyarakat kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung dalam membuat banyak keputusan yang sangat penting yang mempengaruhi kehidupan mereka, dan bisa menjadi bagian pemerintahan mandiri yang demokratis.

Peradilan

Sejarah telah menciptakan perlunya peradilan yang mandiri yang dapat menjaga badan-badan lain dari pelanggaran batas-batas konstitusi, dan khususnya di mana hak azasi manusia menjadi topik kepedulian. Hal ini bisa berupa sistem peradilan yang reguler, seperti yang ada di Amerika Serikat, atau pengadilan khusus, pengadilan konstitusi, yang terbatas untuk memutuskan masalah-masalah konstitusional dan beberapa masalah lainnya, seperti di Jerman. Pada kasus pertama, kekuasaan tertinggi berada di Mahkamah Agung yang terdiri dari hakim pengadilan reguler yang ditunjuk selama hidup dan biasanya menangani banding dari pengadilan lebih rendah; mereka memutuskan masalah-masalah konstitusional hanya bila diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi sengketa. Meskipun demikian, sebagian besar anggota pengadilan konstitusi adalah guru besar hukum dan latar belakang lain yang tidak diambil dari sistem pengadilan reguler dan biasanya bertugas

selama satu, dan biasanya lebih, masa tugas 8-12 tahun. Mereka memutuskan masalah-masalah konstitusional apabila diminta oleh para pejabat pemerintah tinggi, pengadilan, dan di banyak negara, oleh warga negara biasa yang menyatakan bahwa hak-hak mereka telah dilanggar. Sebagian besar demokrasi yang sedang bangkit telah memilih membentuk mahkamah konstitusi, karena peninjauan yudisial oleh hakim biasa bukanlah tradisi mereka, dan juga karena mereka tidak percaya pada peradilan yang ada.

Apapun sistem yang dipilih, konstitusi harus secara eksplisit menetapkan kewenangan pengadilan untuk membatalkan undang-undang dan norma-norma dan peraturan-peraturan yang tidak konsisten dengan konstitusi. Apabila ada mahkamah konstitusi khusus, seharusnya tidak dibebani dengan tanggung jawab berlebihan. Banyak pekerjaannya akan menjadi kontroversial, karena salah satu tugas utamanya, khususnya pada awal-awal tahun, adalah membentuk batasan konstitusional di antara pihak berwenang yang memerintah. Selain itu, kadang-kadang ia juga harus membuat keputusan yang bertentangan dengan pemerintah dalam kasus hak azasi manusia. Di semua contoh ini, biasanya ia akan mendapat kecaman keras dari pihak yang kalah. Konstitusi seharusnya tidak terlalu sering memberi peluang terjadinya penyerangan seperti ini dengan memberi pengadilan konstitusi tugas-tugas yang bersifat non-yudisial atau nonkonstitusional, karena pada masa-masa awal, mereka akan kurang memiliki wibawa dan dukungan rakyat yang mereka sangat butuhkan demi untuk ke-efektifan kinerja mereka.

Mendukung peradilan yang mandiri adalah alasan lain mengapa sebuah konstitusi sebaiknya tidak ringkas. Semakin spesifik sebuah konstitusi, semakin mudah bagi pengadilan untuk menunjuk pada bahasa yang relevan dalam dokumen guna mendukung keputusan mereka yang kontroversial, dan semakin kecil mereka terlihat bertindak sesuai dengan keyakinan subjektif para hakim.

Karena keputusan pengadilan biasanya bersifat sensitif secara politis, maka kemandirian dan ketidakberpihakan mereka harus dijamin secara konstitusional. Peradilan harus sebuah badan pemerintahan yang mandiri dan bukan berada di bawah Departemen Kehakiman. Peradilan harus mengatur sendiri urusan-urusan keuangan dan administrasinya, bebas dari keterlibatan eksekutif, meskipun tunduk pada aturan akhir badan pembuat undang-undang dalam hal anggarannya.

Konstitusi juga harus memastikan bahwa hakim pengadilan rendah menerapkan konstitusi dalam pembuatan keputusan mereka. Di banyak negara demokrasi baru, sering sekali hakim-hakim tersebut mengabaikan isu-isu konstitusional ketika membuat keputusan.

Perlindungan Hak Azasi Manusia

Sekarang telah ditentukan bahwa konstitusi harus melindungi hak azasi manusia dan bahwa pengadilan, khususnya pengadilan konstitusi khusus, harus berperan besar dalam menyediakan perlindungan tersebut. Mahkamah Agung AS telah memelopori perkembangan ini, namun pengadilan di seluruh dunia sekarang mengakui tanggung jawab ini. Bila perjanjian hak azasi manusia yang diratifikasi oleh pemerintah mereka menjadi

topik permasalahan, para hakim menganggap mereka terikat untuk mematuhi perjanjian ini. Mereka biasanya melihat contoh pengadilan negara lain sebagai panduan untuk masalah-masalah serupa. Hasilnya adalah terciptanya undang-undang konstitusional internasional mengenai hak azasi manusia.

Setiap konstitusi baru sekarang berisi pernyataan mengenai hak azasi manusia. Ini tidaklah cukup. Konstitusi harus membentuk lembaga sehingga hak-hak tersebut ditegakkan. Konstitusi harus secara khusus menyediakan bahwa orang yang menyatakan bahwa hak-hak mereka telah dilanggar mempunyai akses ke pengadilan, dan apabila telah terjadi pelanggaran, korban dapat memperoleh pemecahan untuk pelanggaran tersebut. Banyak negara menemukan bahwa ombudsman (biasanya penyelidik atau penengah keluhan) sangat berguna dalam situasi seperti ini. Sebuah kantor khusus di kantor kejaksaan negara juga sangat membantu.

Isu yang sangat penting bagi demokrasi adalah bahwa warga negara dapat belajar apakah pemerintah telah melakukan tugasnya dengan baik dan bertindak untuk kepentingan rakyat. Konstitusi harus berisi ketentuan-ketentuan yang membolehkan warga mempunyai akses yang murah dan cepat ke semua bahan dalam arsip pemerintah, kecuali arsip-arsip yang bila dipaparkan dapat membahayakan keamanan negara, privasi pribadi, penegakan hukum, atau kepentingan nasional penting lainnya. Membiarkan para pembuat hukum untuk menentukan apakah mengadopsi langkah seperti ini adalah sesuatu yang tidak bijak, karena banyak pemerintahan menolak langkah-langkah seperti ini atau secara gamblang mencoba untuk melemahkan

mereka. Tidak banyak pejabat publik bersedia untuk memaparkan kegiatan mereka untuk diawasi secara teliti oleh masyarakat.

Mengadopsi Konstitusi

Pertanyaan terakhir adalah bagaimana konstitusi diadopsi? Oleh majelis konstituen khusus yang telah dibahas sebelumnya? Oleh parlemen reguler, seperti yang terjadi di banyak negara Eropa? Oleh masyarakat umum? Apakah keterlibatan masyarakat umum dilakukan sebelum atau setelah konstitusi dirumuskan? Apabila setelahnya, bagaimana partisipasi masyarakat dilakukan? Pertanyaan-pertanyaan ini dan pertanyaan lain dijawab dengan cara yang berbeda, dan meskipun ilmuwan bidang politik percaya bahwa persetujuan konstitusi harus dilakukan oleh rakyat, hal itu bukanlah pendekatan universal.

Menulis sebuah konstitusi adalah sebuah eksperimen, di mana hasilnya akan berbeda secara signifikan dari apa yang dimaksudkan dan diperkirakan. Lagi pula, keberhasilan sebuah konstitusi biasanya adalah hasil dari faktor-faktor eksternal ekonomi, kekuatan sosial yang berkarya dalam masyarakat, hubungan luar negeri negara, bencana alam, dan banyak faktor lain lagi yang tidak berada dalam kendali para perumus konstitusi.

Meskipun ada kesulitan-kesulitan ini, konstitusi baru bagi demokrasi yang sedang bangkit bisa membuat perbedaan. Mereka menawarkan kesempatan yang jarang untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana makhluk hidup dapat hidup dalam damai dan bebas. Sejarah tidak menawarkan banyak momen seperti ini kepada sebuah negara, dan bila momen itu terjadi, tantangan-tantangannya harus dihadapi, karena taruhannya adalah masa depan bangsa.

Herman Schwartz adalah guru besar hukum di American University, Washington College of Law di Washington D.C., di mana dia adalah ahli di hukum konstitusional, hak-hak sipil, peraturan antitrust dan utility. Dia adalah anggota Delegasi AS pada Sidang ke-50 dan ke-51 Komisi Hak Azasi Manusia PBB pada 1994 dan 1995. Dia adalah pengarang berbagai karya akademis termasuk The Struggle for Constitutional Justice in Post-Communist Europe, (University of Chicago Press, 2000).

Pendapat yang dilukiskan dalam artikel ini adalah pendapat penulis dan tidak mesti mencerminkan pandangan atau kebijakan pemerintah A.S.

Menuju Demokrasi Konstitusional di Seluruh Dunia Sebuah Perspektif Amerika

Oleh A. E. Dick Howard

Guru besar hukum dan hubungan masyarakat A.E. Dick Howard menyampaikan pendapatnya mengenai “Konstitusionalisme, Hak Azasi Manusia, dan Penegakan Hukum di Irak” di depan sidang bersama komite Senat AS yang membahas masalah peradilan dan hubungan luar negeri pada 25 Juni, 2003. Dalam pernyataannya, Profesor Howard meneliti kompleksitas pemerintahan konstitusional yang sedang berkembang di demokrasi yang sedang bangkit belum lama dan pengaruh yang diberikan Konstitusi Amerika. Seiring dengan pergerakan rakyat Irak menuju ke pemerintahan mandiri, pertanyaan tentang bagaimana melembagakan prinsip-prinsip demokrasi yang diabadikan dalam konstitusi tertulis merupakan hal yang utama.

DALAM beberapa tahun terakhir saya mendapat kehormatan untuk duduk bersama dengan para penyusun konstitusi di negara-negara yang sedang meletakkan fondasi demokrasi liberal konstitusional. Beberapa tahun sebelumnya, saya mendapat pengalaman dalam seni penyusunan konstitusi ketika saya terlibat dalam perumusan konstitusi yang diterapkan di negara bagian Virginia saat ini. Tetapi, tidak ada pengalaman yang begitu memberikan pelajaran seperti saat melihat konstitusi terbentuk di negara dan budaya lain.

Pengalaman dalam konstitusionalisme komparatif ini telah membuat saya mengajukan pertanyaan tentang sejauh mana sebuah negara dapat membantu, atau memberi penilaian tentang, perjalanan konstitusional negara lain. Seberapa mulus gagasan konstitusional melakukan perjalanan. Khususnya melewati batas budaya dan sistem hukum yang berbeda? Apakah ada nilai-nilai universal di mana keberhasilan sistem konstitusional relatif bisa diukur? Atau, sebagaimana yang

sebagian orang perdebatkan, haruskah konstitusi pada akhirnya didasarkan pada budaya, sejarah, tradisi, dan lingkungan suatu negara? Bagi rakyat Amerika, ada pertanyaan khusus: Apa relevansi konstitusi Amerika kepada negara-negara lain?

Pengalaman Eropa Tengah dan Timur

Untuk mempertajam pertanyaan ini, pertimbangkan pengalaman negara-negara Eropa Tengah dan Timur. Setelah kejatuhan komunisme, masing-masing negara tersebut mulai menulis konstitusi baru dan merancang lembaga yang dianggap bisa mendorong demokrasi liberal konstitusional. Para perumus konstitusi di negara-negara tersebut punya beberapa sumber yang bisa mereka gunakan untuk merumuskan konstitusi baru.

Dalam beberapa kasus mereka bisa menoleh ke pengalaman mereka. Misalnya, rakyat Polandia mengenang tradisi konstitusionalisme yang berkaitan dengan Konstitusi yang luar biasa pada 3 Mei 1791. Rakyat Hongaria punya tradisi kuat penegakan hukum, yang akarnya dimulai sejak “Golden Bull”¹ pada 1222. Namun tradisi semacam itu seringkali terpisah-pisah dan terasing. Tidak banyak negara di Eropa Tengah dan Timur berpengalaman luas dengan konstitusionalisme, demokrasi atau penegakan hukum sebelum 1989 (Demokrasi Cekoslovakia yang penuh semangat antara dua Perang Dunia adalah pengecualian).

Negara-negara Eropa Tengah dan Timur melihat ke pengalaman Eropa Barat. Eropa Barat adalah tempat kedudukan banyak inti demokrasi konstitusional modern, seperti pengajaran Pencerahan (Gerakan Eropa abad

ke-18 berdasarkan pada alasan kemanusiaan), dan juga sumber dari kebanyakan prinsip konstitusional dasar kita (seperti pemisahan kekuasaan). Selain itu, konstitusionalisme, demokrasi, dan penegakan hukum telah mengakar secara jelas di Eropa Barat sejak Perang Dunia II. Jerman, yang bangkit dari kehancuran perang, telah menjadi contoh demokrasi konstitusional yang luar biasa. Spanyol, yang keluar dari warisan diktator Jenderal Franco, telah menjadi negara Eropa yang modern di segala bidang. Dengan contoh-contoh ini dan contoh lainnya untuk dipelajari, para penyusun rancangan konstitusi di Eropa Tengah dan Timur telah membuat sistem konstitusional yang dalam banyak hal mengambil model dari Eropa Barat. Sebagai contoh, Mahkamah Konstitusi Jerman telah terbukti menjadi inspirasi dibentuknya pengadilan konstitusi di seluruh Eropa Tengah dan Timur.

Norma-norma dan dokumen internasional adalah sumber penting bagi pembuat konstitusi di Eropa pascakomunis, seperti halnya di belahan bumi lain. Hal ini telah terbukti dalam memberi bentuk dan perlindungan pada hak azasi manusia. Maka para pembuat rancangan konstitusi melihat ke dokumen internasional semacam ini seperti konvensi PBB dan ke peraturan regional seperti Konvensi Eropa tentang Hak Azasi Manusia dan Organisasi untuk Kerja sama dan Keamanan dalam dokumen Helsinki dan Kopenhagen di Eropa. Selain itu, sudah menjadi hal yang lumrah bagi konstitusi pascakomunis untuk menyatakan bahwa hukum dan pemerintahan internasional haruslah undang-undang dalam negeri yang ada di dalam sebuah negara.

Orang akan menganggap bahwa para pembuat konstitusi di Eropa Tengah dan Ti-

mur akan mempelajari pengalaman tetangga terdekat mereka di kawasanya. Tampaknya ini sangat membantu bila negara-negara ini memiliki masalah yang sama dengan dunia pascakomunis, seperti hancurnya masyarakat sipil selama era komunis, efek yang sangat membosankan dari ekonomi penguasa, dan sinisme tentang kehidupan publik yang ditimbulkan oleh tahun-tahun tersebut. Tetapi, saya punya kesan bahwa para penyusun rancangan konstitusi di kawasan itu tidak terlalu peduli untuk mempelajari pengalaman tetangga terdekat mereka. Hal ini sebagian mungkin sebagai konsekuensi dari rasa benci yang sudah lama terjadi di kawasan tersebut. Namun ini juga menekankan tarikan yang kuat dari model barat, khususnya dari sudut pandang keinginan yang merata dari negara-negara Eropa Tengah dan Timur untuk “bergabung kembali ke” keluarga Eropa, khususnya, untuk menjadi anggota Uni Eropa.

Apakah dunia pascakomunis berpaling ke pengalaman Amerika dan ke gagasan dan model Amerika? Pandangan yang dangkal pada konstitusi baru di kawasan tersebut mengesankan bahwa pengaruh Amerika hanya sedikit. Orang melihat, misalnya, di seluruh Eropa Tengah dan Timur, sistem yang digunakan adalah sistem parlementer ketimbang sistem kongres bergaya Amerika, sistem presidential yang tampak lebih mirip model Eropa Barat (seperti Prancis) ketimbang model Amerika Serikat, dan pengadilan konstitusi yang mirip dengan Jerman ketimbang Mahkamah Agung bergaya Amerika. Pertanyaan mengenai pengaruh Amerika, baik itu di Eropa pascakomunis ataupun di negara lain (seperti Irak), memerlukan penyelidikan yang lebih dalam ketimbang pengamatan yang dangkal ini.

Pengaruh Konstitusionalisme Amerika: Perspektif Bersejarah

Masa revolusioner Amerika adalah masa inovasi dan pencapaian yang luar biasa. Sadar akan tempatnya yang khusus dalam sejarah, para pendiri Amerika membentuk ide-ide seperti federalisme, pemisahan kekuasaan, peninjauan yudisial, dan konsep lain yang terbukti merupakan prinsip utama dari konstitusionalisme modern, tidak hanya di Amerika Serikat, tetapi juga di banyak negara lain. Masyarakat Amerika berbeda dalam beberapa aspek penting dari masyarakat Eropa; misalnya, tidak ada monarki dan tatanan masyarakat yang berurat berakar secara hukum. Meskipun begitu, rakyat Eropa mengikuti dengan penuh minat evolusi konstitusionalisme Amerika dari Perang Revolusi; hingga pembuatan Konstitusi dan selanjutnya.

Selama dua abad atau lebih, telah terjadi lalu lintas yang intens pada ide-ide konstitusi antara Amerika dan negara-negara lain. Adapun pokok-pokok penting dari pertukaran tersebut meliputi berikut ini.

Masa pendirian di Prancis dan Amerika. Revolusi Prancis pada 1789, membuat Prancis lebih memperhatikan ide-ide Amerika. Negarawan Amerika Benjamin Franklin, yang sangat populer di Paris, berusaha untuk menyebarluaskan berita yang terjadi di Amerika, demikian juga dengan penerusnya, (presiden selanjutnya) Thomas Jefferson. Deklarasi Hak-hak Virginia/Virginia Declaration of Rights (1776) mempengaruhi penyusunan rancangan Deklarasi Hak-hak Manusia dan Warga Negara Prancis (1789). Ketika Majelis Nasional Prancis memperdebatkan konstitusi pertama Prancis, faksi-faksi radikal

dan moderat merujuk contoh-contoh yang diambil dari pengalaman konstitusi negara bagian Amerika, khususnya Massachusetts dan Pennsylvania.

Liberalisme pada abad ke sembilan belas. Pada masa awal dasawarsa abad ke sembilan belas, pelaku reformasi liberal di Eropa dan Amerika Selatan merujuk Amerika Serikat sebagai bukti bahwa demokrasi liberal dapat bertahan dan tumbuh subur. Ketika revolusi 1848 pecah di Eropa, pertemuan konvensi di Prancis dan Jerman seringkali mengkaji lembaga-lembaga Amerika dalam memutuskan seperti apa bentuk konstitusi liberal di Eropa. Hingga saat itu, karya filsuf dan sejarawan Prancis Alexis de Tocqueville, *Demokrasi di Amerika* (*Democracy in America*), telah mempertinggi minat pada pengalaman Amerika, khususnya soal federalisme dan peninjauan yudisial. Konstitusi Paulskirche Jerman 1849, yang dirancang di Frankfurt, memang tidak diterapkan tetapi prinsip-prinsipnya, sebagian dibangun mengambil ide-ide konstitusi Amerika (misalnya federalisme dan peninjauan konstitusional), muncul kembali dalam Undang-Undang Dasar Jerman 1949. Di Amerika Selatan, zaman Simon Bolivar membawa konstitusi yang sangat mencontoh Konstitusi Amerika Serikat.

Evangelisme politik pada awal abad ke dua puluh. Upaya-upaya paling terkenal untuk mengeskpor ide-ide Amerika pada awal abad ke-20 adalah, dengan kemenangan sekutu pada Perang Dunia I, tujuan Presiden Woodrow Wilson untuk “menjadikan dunia aman bagi demokrasi.” Wilson tidak berharap negara lain untuk mengadopsi konstitusi bergaya Amerika, tetapi dia menekankan isu penentuan diri sendiri, pemilu bebas, penegakan hukum, hak-hak individu, dan

peradilan yang bebas. Demokrasi yang paling berhasil yang muncul dari puing-puing Perang Dunia I adalah Cekoslovakia, yang pendiri terkemukanya Thomas Masaryk, telah menghabiskan sebagian masa perang di Amerika Serikat, bekerja keras mempengaruhi kebijakan Amerika, dengan mengingatkan rakyat Amerika akan Deklarasi Kemerdekaan mereka.

Jepang dan Jerman setelah Perang Dunia II. Setelah Jepang menyerah pada 1945, Jenderal Douglas McArthur segera bertindak untuk mengamankan perumusan sebuah konstitusi baru. Khawatir bahwa elite Jepang bila dibiarkan melakukan apa saja yang mereka inginkan akan melakukan sedikit perubahan yang substantif dari keadaan status quo, maka McArthur menginstruksikan pemerintahan militernya untuk merumuskan sebuah konstitusi, yang mereka kerjakan hanya dalam hitungan waktu.

Pada saat sedang berlangsung perumusan pada apa yang kemudian menjadi Undang-Undang Dasar Jerman 1949, Perang Dingin mulai mendominasi kebijakan luar negeri Amerika. Kekuatan sekutu yang berkuasa tentu saja punya hak untuk mengeluarkan pendapat dalam membentuk kebijakan Jerman pascaperang. Namun, dengan pandangan Amerika dan sekutunya yang melihat Uni Soviet sebagai ancaman besar, rakyat Jerman punya lebih banyak kebebasan menentukan dalam perumusan Undang-Undang Dasar. Ada beberapa cara penting di mana Undang-Undang Dasar memiliki prinsip-prinsip yang tidak asing bagi rakyat Amerika, seperti federalisme dan peninjauan yudisial. Tetapi dokumen 1949 sangat mendekati tradisi konstitusi Jerman itu sendiri, termasuk Konstitusi Paulskirche.

Gelombang demokratisasi pada dasawarsa selanjutnya pada abad ke dua puluh. Penyebaran konstitusionalisme, demokrasi dan penegakan hukum muncul secara bergelombang pada penutupan dasawarsa abad ke dua puluh. Pada 1970-an kita menyaksikan pemerintahan otoriter menyerah kepada demokrasi di negara-negara kawasan mediterania seperti Yunani, Portugis, dan Spanyol. Konstitusi Spanyol 1978 berperan penting sekali sebagai model bagi negara-negara pascaotoriter lain. Perhatian beralih ke Amerika Selatan pada 1980-an, terutama Argentina dan Chili. Tahun yang paling penting adalah 1989, tahun di mana Tembok Berlin runtuh dan komunisme ambruk di seluruh Eropa Tengah dan Timur. Gelombang kejutan juga menyapu Afrika Selatan, di mana rezim Apartheid ambruk, dan konstitusi baru berlaku pada 1997.

Bantuan Amerika pada penyusunan konstitusi dan demokratisasi di tempat negara-negara pascakomunis dilaksanakan oleh badan publik dan swasta. Secara umum bantuan adalah dalam bentuk bantuan teknis, seperti membantu parlemen untuk memperbaiki proses mereka, menjaga peradilan yang mandiri, dan membantu perumusan konstitusi dan undang-undang baru. Sebuah program yang secara khusus efektif adalah American Bar Association's Central European and Eurasian Law Initiatives, yang telah mengirim ratusan ahli hukum untuk bekerja di banyak negara.

Tempat dan Relevansi Pengalaman Konstitusional Amerika

Konstitusionalisme harus dipahami sebagai ekspresi budaya. Sebagian orang akan

memperdebatkan pemikiran ini jika ia diajukan sebagai sebuah peringatan, yakni bahwa orang harus mempertimbangkan budaya dalam memikirkan tentang konstitusi dan konstitusionalisme. Tetapi sebagian pengamat membahas argumen tersebut lebih jauh, berpendapat bahwa tak ada elemen konstitusionalisme yang “universal”. Misalnya, dengan pandangan ini, hak-hak masyarakat atau kelompok dapat dihargai di atas hak-hak perorangan.

Konstitusionalisme Amerika adalah hasil dari asumsi Pencerahan, kental dengan konstitusionalisme Inggris, dan terbentuk dalam wadah sejarah Amerika. Oleh karena itu, sebagian orang berdalih bahwa ajaran konstitusionalisme Amerika tidak dapat diekspor ke budaya lain. Argumen seperti itu sering mengutip kegagalan konstitusi-konstitusi Amerika Latin yang berdasarkan pada model AS dan isu yang lebih kini seperti di Filipina.

Bahkan mereka yang berpikir bahwa pengalaman Amerika adalah relevan dan berguna ternyata menemukan keterbatasan dalam konstitusi Amerika Serikat sebagai model bagi pembuat rancangan konstitusi luar negeri. Dokumen tersebut ditulis pada abad ke-18, mencerminkan pandangan pada zaman itu, dan memerlukan amandemen resmi (terutama amandemen pasca-Perang Saudara) serta penafsiran yudisial yang luas. Selain itu, Konstitusi Amerika Serikat, dalam beberapa hal, adalah dokumen yang tidak lengkap, dalam arti bahwa pembuat kerangkanya berpendapat tentang keberadaan dan fungsi negara-negara bagian dan oleh karenanya tentang konstitusi negara (dokumen yang dalam banyak hal lebih menyerupai konstitusi di negara lain).



Anggota Dewan Pemerintahan Irak menyaksikan sementara Hachin al-Hasani, perwakilan anggota Mushin Abdul Hamid, menandatangani konstitusi sementara Irak yang baru di Baghdad, Senin, 8 Maret 2004.

Semua pengamatan ini harus dipertimbangkan, khususnya sebelum menganggap bahwa apa yang telah berhasil di Amerika pasti akan berhasil bagi orang lain juga. Kemaslahatan pengalaman Amerika tidak terletak pada teks resmi Konstitusi Amerika Serikat. Ia ditemukan pada prinsip-prinsip umum yang tercermin dalam konstitusionalisme Amerika, dan lebih jauh lagi pada pengalaman praktis dalam membuat demokrasi konstitusional berjalan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prospek bagi Demokrasi Liberal Konstitusional

Sebuah masyarakat yang demokratis tidaklah cukup. Masyarakat haruslah liberal dan konstitusional. Demokrasi diperlukan guna memastikan bahwa pemerintahan berdasarkan pada persetujuan yang diperintah dan bertanggung jawab kepada rakyat. Tetapi demokrasi harus juga liberal, yaitu berkomit-

men pada hak-hak dan kebebasan individu, terhadap prinsip-prinsip yang didukung oleh filsuf Inggris John Locke yang menyatakan bahwa negara tergantung pada individu, dan bukan sebaliknya. Demokrasi juga harus konstitusional, yakni harus ada cara untuk memastikan penegakan norma-norma konstitusional, meskipun cara tersebut bertentangan dengan penilaian kaum mayoritas. Faktor-faktor berikut sangat penting bagi keberhasilan demokrasi liberal konstitusional.

Sebuah negara harus mempunyai kekuatan militer yang memadai, serta stabilitas sosial dan ekonomi, untuk menghadapi agresi luar dan untuk menjaga subversi dari dalam negeri atau kerusuhan. Tentu saja kekuatan tersebut tidak datang hanya dengan sendirinya berasal dari sumber daya, sebuah negara harus berpaling ke sekutunya untuk bantuan.

Budaya konstitusional yang bergelora biasanya berjalan seiring dengan ekonomi yang sehat. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa karena negara itu kaya maka berarti negara itu negara demokrasi konstitusional. Tapi wajar bila kita katakan bahwa kondisi ekonomi yang buruk biasanya mampu memperlemah harapan untuk tercapainya demokrasi konstitusional.

Harus ada budaya politik saya menyebutnya budaya konstitusional yang mendorong nilai-nilai konstitusionalisme, liberalisme dan demokrasi, dan penegakan hukum. Hal ini menunjukkan tingkat melek huruf tingkat tinggi. Ini juga menunjukkan bahwa kondisi lingkungan di mana rakyat mempraktikkan norma-norma kerja sama dan toleransi berkaitan dengan bangkitnya dan runtuhnya peruntungan prinsip sosial dan politik, kandidat, dan partai. Ini berarti mereka yang kalah dalam pemilu mengalihkan kekuasaan kepada sang pemenang. Ini berarti bahwa mereka yang mendapat kemenangan dalam proses legislasi yang dikalahkan atas dasar konstitusi oleh pengadilan menerima prinsip keterbatasan konstitusi pemerintah.

Sebuah masyarakat yang terbuka, termasuk pers dan media yang bebas dan bertanggung jawab, berjalan beriringan dengan konstitusionalisme dan demokrasi. Harus ada cara bagi komunikasi yang terbuka dan efektif di antara rakyat dan antara mereka dan pemerintahan mereka.

Masyarakat sipil harus tumbuh dengan subur. Organisasi swasta partai politik, serikat dagang, kelompok yang berminat, perkumpulan dan sebagainya menciptakan penyangga yang penting antara individu dan negara. Organisasi seperti itu menawarkan tempat penampungan bagi mereka yang

berpikir bahwa politik saat itu bukanlah minat mereka. Mereka menyediakan lokasi pelatihan bagi mereka yang berkualitas yang menjadikan kewargaan yang efektif dan memungkinkan suara dan tindakan bersama yang menghalangi monopoli kekuasaan oleh negara.

Negara harus berdasarkan pada prinsip kewarganegaraan (civic), ketimbang pada etnis atau kebangsaan. Itu berarti semua warga negara harus mempunyai kedudukan yang sama dalam masyarakat. Tidak boleh ada “orang dalam (insiders)” dan “orang luar (outsiders)”. Jika negara itu tidak bersifat homogen dalam hal agama, bahasa, etnis, atau budaya, maka harus ada komitmen yang besar terhadap hak-hak kelompok minoritas. Untuk menjadikan demokrasi liberal konstitusional berhasil, rakyat harus mempunyai rasa saling percaya dan kemampuan bekerja sama, ketimbang terberai ke dalam kelompok kebencian dan permusuhan.

Pada akhirnya, sejarah, budaya, dan situasi lingkungan akan banyak memberitahu kita tentang masa depan konstitusionalisme, demokrasi, dan penegakan hukum di semua negara. Mereka yang berharap melihat nilai-nilai ini tumbuh subur di demokrasi yang baru terbentuk harus memahami negara itu, rakyatnya, sejarahnya dan budayanya. Contohnya adalah argumen mengenai sejauh mana Islam kompatibel atau tidak kompatibel dengan demokrasi liberal konstitusional dalam sebuah negara seperti Irak. Sejarah Irak sendiri, misalnya, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan apakah pengalaman parlemen dari peraturan Hashemite pada masa-masa sebelum 1958 mempunyai warisan yang berguna, atau mungkin kaum kelas menengah cukup kokoh untuk bisa bertahan

dalam masa-masa penindasan rezim Saddam. Para ahli tentang Irak akan dapat menjelaskan penilaian ini. Tapi mereka yang akan membuat sejarah di Irak juga harus melihat pelajaran yang harus dipelajari dari transisi dari rezim totaliter ke rezim otoriter dimanapun. Jalan menuju konstitusionalisme, demokrasi, dan penegakan hukum adalah satu melalui banyak negara.

A.E. Dick Howard adalah White Burkett Miller Professor of Law and Public Affairs and Roy L. and Rosamond Woodruff Morgan Research Professor of Law di University of Virginia. Dia dikenal luas sebagai ahli di bidang undang-undang konstitusi, konstitusionalisme komparatif, dan Mahkamah Agung AS. Sebelum datang ke Virginia, Profesor Howard selama dua tahun bekerja sebagai panitera hukum pada Hakim Mahkamah Agung AS Hugo L. Black. Howard telah membela dan memperdebatkan kasus-kasus di hadapan pengadilan negara bagian dan federal, termasuk Mahkamah Agung Amerika Serikat. Profesor Howard sering dimintai konsultasi oleh para penyusun rancangan konstitusi di negara bagian AS lain dan luar negeri, dia telah membandingkan catatan dengan para pembuat revisi lain pada karya mengenai konstitusi baru di negara-negara seperti Brazil, Filipina, Hongaria, Polandia, dan Afrika Selatan.

Catatan:

1. Merujuk ke piagam yang diberikan Raja Andrew II dari Hongaria pada 1222, yang menyatakan hak-hak dasar dan privilese dari bangsawan dan pendeta serta batas-batas dari kekuasaan monarki.

Pendapat yang dilukiskan dalam artikel ini adalah pendapat penulis dan tidak mesti mencerminkan pandangan atau kebijakan pemerintah A.S.

Foto di halaman 25: AP/WWP, Brenann Linsley

Pentingnya Kemandirian Yudisial

Sambutan oleh Sandra Day O'Connor
Hakim Anggota, Mahkamah Agung Amerika Serikat di
hadapan Forum Yudisial Arab, Manama, Bahrain, 15
September 2005

ALEXANDER HAMILTON, salah satu Pembuat Kerangka Konstitusi Amerika, menulis dalam *The Federalist* No. 78 untuk membela peran yudikatif dalam struktur konstitusional. Dia menekankan bahwa “tidak ada kebebasan, jika kekuasaan mengadili tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif.”...[K]ebebasan tidak perlu takut pada yudikatif, tetapi ia harus takut pada penyatuannya dengan salah satu badan lain.” Pandangan Hamilton lebih penting dari perbedaan-perbedaan antara sistem yudisial negara. Hanya dengan kemandirian realitas dan pemunculan kepatuhan yang bergelora pada Aturan Hukum bagi rakyat dapat dijamin. Seperti yang dikatakan oleh mantan Presiden AS Woodrow Wilson yang menulis, Pemerintah “memenuhi janjinya, atau tidak memenuhi janjinya, dalam pengadilan. Oleh karena itu bagi individu,... perjuangan untuk pemerintah konstitusional adalah perjuangan untuk hukum yang baik, tetapi juga bagi pengadilan yang cerdas, bebas dan tidak memihak.” Kita harus selalu ingat

akan pentingnya kemandirian guna berfungsinya secara efektif badan yudikatif.

Prinsip bahwa yudikatif yang bebas sangat penting bagi terlaksananya keadilan yang benar sangat menyatu dalam lembaga hukum Arab. Sebenarnya semua konstitusi Arab menjamin kemandirian yudisial. Misalnya, Konstitusi Kerajaan Bahrain dalam Pasal 104 menyatakan bahwa “Kehormatan peradilan, dan ketulusan dan ketidakberpihakan hakim, adalah dasar pemerintah dan penjamin hak-hak dan kebebasan. Tidak ada kekuasaan yang melebihi keputusan hakim, dan dalam situasi apapun jalannya keadilan tidak boleh dicampuri. Undang-undang menjamin kemandirian yudikatif...” Pasal 65 Konstitusi Mesir menyatakan: “kemandirian dan kekebalan peradilan adalah dua jaminan yang melindungi hak-hak dan kebebasan.” Konstitusi Yordania, dalam pasal 97, menyatakan bahwa “Hakim itu mandiri, dan dalam menjalankan fungsi yudisial mereka tidak tunduk pada perintah lain kecuali undang-undang.”

Kita juga melihat pemikiran yang sama yang terwujud dalam enam Prinsip Perilaku yudikatif Bangalore, yang dibuat di bawah pengawasan PBB untuk lebih memperkuat integritas yudisial. Prinsip yang paling utama menyatakan: “Kemandirian yudisial adalah persyaratan bagi penegakan hukum dan jaminan paling penting untuk persidangan yang jujur. Oleh karenanya seorang hakim wajib menjunjung tinggi dan memberi teladan kemandirian yudisial baik dalam aspek individu maupun kelembagaan.” Deklarasi Kairo tentang Kemandirian Yudisial, yang dirumuskan pada Konferensi Keadilan Arab Kedua pada Februari 2003, “menyetujui bahwa peradilan yang bebas adalah pilar utama yang mendukung kebebasan sipil, hak azasi manusia, proses perkembangan yang komprehensif, reformasi dalam perdagangan dan bidang investasi, kerja sama ekonomi regional dan internasional, dan pembangunan lembaga demokrasi.”

Prinsip ini juga menyokong lembaga peradilan di Amerika Serikat. Para Pendiri Amerika Serikat mengakui bahwa berfungsinya peradilan yang efektif yang tidak tunduk pada dominasi bagian lain pemerintahan adalah sangat penting. Untuk mencapai tujuan ini, Konstitusi Amerika Serikat membentuk peradilan federal yang bebas dengan memisahkan fungsi penyusunan undang-undang pada badan legislatif dari peran menerapkan undang-undang pada badan yudikatif. Pemisahan kekuasaan legislatif dan yudikatif terbukti sangat penting dalam menjaga Penegakan Hukum. Apabila peran pembuat undang-undang dan hakim dimainkan oleh para pelaku pemerintahan yang berbeda, bahaya akan kesewenangan pemerintahan akan sangat kecil. Apabila

kekuasaan untuk membuat undang-undang dipisahkan dari kekuasaan untuk menafsirkan dan menerapkan undang-undang itu, fondasi terdasar dari Aturan Hukum—bahwa kontrol versi diputuskan berdasarkan pada aturan-aturan yang ditetapkan sebelumnya—akan semakin kuat.

Peradilan yang mandiri mengharuskan hakim bebas dalam menjalankan kekuasaan-nya, dan bahwa peradilan secara keseluruhan bersifat bebas, ruang lingkup kewenangannya dilindungi dari pengaruh, baik secara terang-terangan atau terselubung, oleh pelaku pemerintahan lain. Dalam ungkapan prinsip Bangalore, kemandirian yudisial mempunyai “aspek individu dan kelembagaan.”

Dalam menyikapi kemandirian hakim individu, ada dua cara untuk menjamin kemandirian tersebut: Pertama, hakim harus dilindungi dari ancaman aksi balas dendam, sehingga ketakutan tidak menghantui keputusan yang mereka buat. Kedua, metode pemilihan hakim, dan prinsip etika yang harus mereka patuhi, harus dibuat sedemikian rupa sehingga meminimalkan risiko terjadinya korupsi dan pengaruh luar.

Di Amerika Serikat, perlindungan terhadap aksi balas dendam dilakukan dengan menjaga jabatan dan gaji hakim di luar jangkauan kekuatan luar. Konstitusi AS menyatakan bahwa hakim federal menjabat “selama mereka berkelakuan baik”. Hal ini dipahami sebagai hal yang berlaku seumur hidup, tanpa ada kelakuan buruk yang paling serius. Konstitusi juga menjamin bahwa kompensasi hakim federal tidak boleh dikurangi selama mereka menjabat. Maka, ketentuan ini memastikan bahwa hakim tidak akan takut untuk menegakkan hukum sebagaimana adanya. Keamanan dalam gaji dan jabatan

membuat hakim leluasa untuk melaksanakan penilaian hukum terbaik mereka dalam menerapkan undang-undang secara adil dan tidak berpihak terhadap pihak yang mereka sidang. Kerajaan Bahrain menerapkan metode yang sama untuk memastikan bahwa anggota Pengadilan Konstitusi baru akan aman dalam jabatan mereka, dengan menyediakan Pasal 106 Konstitusi tersebut yang menyatakan bahwa anggota pengadilan “tidak dapat dikenai pemecatan” selama masa jabatan mereka.

Harus dilakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa hakim menjalankan kekuasaan mereka secara tidak memihak dan tidak berdasarkan pada kepentingan pribadi atau pengaruh luar. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh perasaan bias kepada atau terhadap pihak yang berperkara, juga tidak boleh ada pertarungan pribadi pada hasil suatu kasus tertentu. Hakim tidak akan pernah memenangi rasa hormat dan kepercayaan rakyat bila mereka menyerah kepada pengaruh yang merendahkan. Kapanpun seorang hakim membuat keputusan hanya untuk keuntungan pribadi, atau untuk menjilat, atau untuk memperturutkan kesenangan pribadi, tindakan itu telah merendahkan penegakan hukum. Pemilihan hakim dan prinsip etika yang menjadi pedoman perilaku mereka harus dibuat dengan pertimbangan-pertimbangan ini sebagai aspek utama.

Pemilihan hakim berdasarkan jasa calon, sesungguhnya adalah kunci untuk memastikan bahwa hakim akan bertindak tidak memihak. Pertimbangan lain selain jasa memberi dorongan bagi pelaku politik untuk menunjuk seorang hakim (atau memilih untuk memilih hakim) tampaknya adalah per-

timbangan yang akan dapat menghalangi seorang hakim memutuskan kasus secara adil dan tanpa bias. Dengan mengakui bahwa kepentingan ini bisa dipenuhi dengan mengumpulkan sebanyak mungkin calon yang berjasa, Deklarasi Beirut pada Konferensi Arab Pertama tentang Keadilan merekomendasikan bahwa “Pemilihan hakim harus bebas dari diskriminasi yang berdasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, keyakinan, bahasa, asal negara, status sosial, kelahiran, kekayaan, partai politik, atau pertimbangan lainnya.” Khusus dalam memilih hakim, prinsip kesempatan yang sama harus diikuti guna menjamin bahwa semua pelamar untuk posisi yudisial dapat dinilai secara objektif. “Selain itu Deklarasi tersebut merekomendasikan bahwa “tidak boleh ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan berkaitan dengan memegang jabatan tanggung jawab yudisial.” Dengan menghiraukan rekomendasi ini berarti tidak hanya memilih setiap calon berdasarkan jasa, tetapi juga akan memperkecil bias kelembagaan yang mungkin muncul apabila peradilan seluruhnya bersifat homogen.

Mematuhi prinsip kemandirian yudisial bukan tidak ada kendala. Masalah yang cukup mengganggu adalah timbulnya ketegangan, begitu seorang hakim ditunjuk, antara kemandirian dari tekanan politis dan kemandirian dari noda kepentingan pribadi. Perlindungan terhadap pengaruh yang dimunculkan oleh badan lain pemerintahan, dan bahkan oleh badan yudisial lain, seperti masa jabatan selama hidup dan perlindungan gaji, mengharuskan adanya kedisiplinan yang sangat tinggi. Tentu saja, jika seorang hakim tidak mampu mematuhi ketentuan kemandirian yang paling fundamental—

dengan menerima sogokan, misalnya— maka pasti akan dipecat. Tetapi kecuali untuk tindakan-tindakan seperti itu, kedisiplinan adalah hal yang sulit.

Di Amerika Serikat, mempertahankan peradilan yang bebas dan mandiri telah dicapai dengan keberhasilan yang luar biasa melalui norma-norma etika yang diterapkan sendiri. Dalam ungkapan mantan Hakim Agung Harlan Stone, “satu-satunya yang mengawasi bagaimana kami menjalankan kekuasaan adalah pengendalian diri kita sendiri.” Setiap peradilan negara bagian AS dan federal mempunyai Aturan Berperilaku yang mendorong kepatuhan kepada norma-norma etika tertinggi. Prinsip yang paling utama dari Aturan Berperilaku (Code of Conduct) bagi hakim federal mengingatkan hakim untuk “menjunjung integritas dan kemandirian peradilan.” Seperti yang dijelaskan oleh Aturan Berperilaku, “peradilan yang mandiri dan terhormat adalah keharusan bagi keadilan dalam masyarakat kita.”

Selain menempatkan batasan-batasan yang jelas pada perilaku hakim, seperti melarang hakim memutuskan sebuah kasus di mana dia mempunyai kepentingan pribadi di dalamnya, Aturan Berperilaku mengakui pentingnya persepsi peradilan. Persepsi korupsi, bias, atau tindakan tidak etis lain hampir pasti merugikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan rasa hormatnya pada penegakan hukum sebagai realisasi tindakan-tindakan tersebut. Hakim tidak saja harus menghindari ketidakpantasan, tetapi juga penampilan ketidakpantasan, jika ingin menjaga kepercayaan rakyat pada peradilan. Maka, Aturan Berperilaku bagi hakim federal mengharuskan hakim untuk menahan diri perilaku yang

akan menciptakan persepsi bahwa kemampuan hakim untuk melaksanakan tanggung jawab yudisialnya dengan penuh integritas, tidak memihak, dan berkemampuan, tidak dirusak. Dengan mendesak hakim menciptakan, menjaga dan menjalankan standar perilaku tertinggi, kode etik yudisial dirancang untuk memastikan ketidakberpihakan dan bahwa setiap kasus akan mendapat persidangan yang adil.

Deklarasi Kairo mendesak pemerintah di kawasan Arab untuk “mengadopsi kode etik profesional yang konsisten dengan misi peradilan yang mulia.” Cara sederhana dan menarik untuk melakukannya adalah dengan mengadopsi Prinsip-Prinsip Bangalore, yang dianggap sebagai seperangkat norma etika yang baik. Prinsip tersebut disusun dalam enam pokok nilai-nilai: kemandirian, ketidakberpihakan, integritas, kepantasan, kesetaraan, dan kemampuan (kompetensi). Instruksi yang nyata dan rinci memberi sajian praktis pada setiap nilai. Saya yakin bahwa apabila Prinsip tersebut diadopsi, ia akan berperan efektif seperti yang diberikan oleh berbagai Aturan Berperilaku di Amerika Serikat.

Saya telah mendiskusikan mekanisme untuk memastikan bahwa hakim perorangan akan dapat menunjukkan karya mereka bebas dari pengaruh luar. Tetapi peradilan yang mandiri juga mewajibkan adanya perlindungan dari pengaruh yang lebih sistematis dari badan lain pemerintahan. Aspek mendasar dari kemandirian lembaga ini adalah memastikan bahwa peradilan mendapat pendanaan yang memadai. Seperti halnya perlunya perlindungan gaji untuk kemandirian hakim, masalah-masalah keuangan secara umum dapat mempengaruhi kinerja

peradilan secara keseluruhan. Deklarasi Beirut merekomendasikan bahwa “negara wajib menjamin anggaran yang mandiri bagi peradilan, termasuk semua badan dan lembaganya. Anggaran ini harus dimasukkan dalam satu pos ke dalam anggaran negara, dan harus ditentukan berdasarkan saran dewan yudisial yang lebih tinggi dalam badan yudisial.” Deklarasi Kairo mendesak pemerintah untuk “menjamin keuangan peradilan yang mandiri.” Memastikan pendanaan yang memadai dan tak bersyarat, sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh deklarasi ini, merupakan langkah sangat penting dalam membentengi peradilan dari pengaruh yang tidak baik.

Masalah yang lebih rumit adalah bahwa interaksi antara pejabat eksekutif dan yudikatif. Saya telah sebutkan sebelumnya bahwa ketegangan yang muncul antara kemandirian dari para pelaku pemerintahan lain di satu sisi, dan memastikan bahwa hakim tidak mempertaruhkan kemandirian mereka dengan menyerah pada bias pribadi atau korupsi di sisi lain. Di Amerika Serikat, kami lebih merasa khawatir pada keprihatinan yang pertama, dan menyerahkan keprihatinan kedua kepada prinsip etika peradilan yang mengatur diri sendiri. Kondisi lingkungan yang berbeda tentu saja mungkin mengharuskan adanya keseimbangan antara keduanya. Meskipun demikian, harus selalu diperhatikan guna memastikan bahwa kemandirian peradilan tidak boleh dipertaruhkan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan berkedok sebagai mendisiplinkan hakim yang nakal.

Kemandirian peradilan bukan tujuan dari kemandirian itu sendiri, tetapi sebagai alat untuk sebuah tujuan. Ia adalah inti dari

penegakan hukum, memberi kepercayaan warga negara bahwa Hukum akan diterapkan secara adil dan setara. Kepentingan ini sangat terpapar jelas dalam perlindungan yudisial hak azasi manusia. Kemandirian yudisial memungkinkan hakim membuat keputusan yang tidak populer. Hakim federal di Amerika Serikat sekali waktu diminta untuk bersikap tegas terhadap keinginan mayoritas. Misalnya, keputusan Mahkamah Agung tahun 1954 dalam kasus Brown melawan Dewan Sekolah, yang menyatakan bahwa fasilitas pendidikan yang terpisah bagi anak-anak dari ras yang berbeda pada prinsipnya tidak adil, memancing kecaman sangat keras di sebagian besar wilayah negara. Tetapi, keputusan tersebut, adalah momen yang sangat penting dalam pengakuan hak-hak sipil dan politik di Amerika Serikat.

Kemandirian yudisial juga memungkinkan hakim untuk membuat keputusan yang mungkin bertentangan dengan kepentingan badan pemerintahan lain. Presiden, menteri dan anggota dewan sekali waktu harus segera mencari solusi yang nyaman terhadap tekanan waktu. Peradilan yang mandiri secara unik diposisikan untuk mencerminkan dampak solusi tersebut terhadap hak-hak dan kebebasan, dan harus bertindak untuk memastikan bahwa nilai-nilai tersebut tidak disepelekan. Kemandirian adalah cikal-bakal keberanian yang diperlukan agar penegakan hukum berjalan.

Setiap negara akan menempatkan cirinya sendiri yang unik dalam sistem hukum yang diciptakan, namun beberapa prinsip melewati batas perbedaan-perbedaan nasional. Pentingnya peradilan yang kuat dan mandiri adalah salah satu prinsip tersebut. Memang cukup mudah untuk setuju bahwa kemandiri-

an peradilan sangat penting untuk menjunjung penegakan hukum, tetapi tantangan yang lebih berat adalah tugas bagaimana mempraktikkan prinsip ini.

Sandra Day O'Connor dicalonkan untuk menjabat di Mahkamah Agung AS oleh Presiden Ronald Reagan. Dia menduduki jabatannya pada 25 September 1981.

Pendapat yang dilukiskan dalam artikel ini adalah pendapat penulis dan tidak mesti mencerminkan pandangan atau kebijakan pemerintah A.S.

Penyusunan Konstitusi Demokratis Pengalaman Afrika Selatan

Oleh Vivien Hart

Proses konstitusional Afrika Selatan adalah salah satu usaha keras nasional yang sesungguhnya untuk pertama kali, mendorong partisipasi semua sektor masyarakat negara yang dulunya pernah terbagi. Penulis memberi perhatian khusus pada metode dan prosedur yang mendorong terjadinya partisipasi dan waktu yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan mengenai sebuah konstitusi baru. Artikel ini disarikan dari Special Report: Democratic Constitution Making, sebuah penerbitan dari the United States Institute of Peace.

NEGARA-NEGARA BERKEMBANG di Afrika dan di benua lain sedang melakukan eksperimen dengan struktur dan bentuk baru partisipasi dalam upaya untuk mengembangkan proses terbuka yang menempatkan inisiatif di tangan rakyat dan menciptakan pembicaraan yang konstitusional. Dalam banyak kasus, alih-alih bekerja di dalam kerangka badan prosedur dan preseden yang sudah ada, negara-negara ini memulai dengan daftar calon yang bersih.

Konstitusi Afrika Selatan 1996, misalnya, dianggap sebagai teks konstitusional panutan. Demikian juga halnya, proses di mana ia dibuat diakui sebagai bagian penting dari transisi yang berhasil dari masa penindasan apartheid ke masyarakat demokratis. Aspek-aspek berikut sehubungan dengan proses di Afrika Selatan menggambarkan konteks dan tantangan-tantangan pembuatan konstitusi demokratis dan menetapkan konteks untuk mengevaluasi potensi dan masalah umumnya.

Perundingan tentang Proses

Untuk berhasil mencapai konstitusi akhir, secara keseluruhan memerlukan waktu tujuh tahun dari 1989 sampai 1996. Hampir lima tahun berlalu antara pertemuan pertama antara pemimpin Kongres Nasional Afrika Nelson Mandela dan Perdana Menteri P.W. Botha pada 1989 dan kesepakatan mengenai konstitusi sementara dan pemilu nonrasis pertama pada 1994. Selama tahun ini, wabah kekerasan mengancam proses tersebut. Pada fase penting dari 1990 sampai 1994, kesepakatan mengenai proses dirundingkan dalam sidang pribadi atau publik antara bekas lawan. Ini termasuk kesepakatan untuk melakukan perundingan mengenai perundingan-perundingan konstitusional; perdebatan berkepanjangan mengenai bentuk bagaimana seharusnya proses pembuatan konstitusi; dan kesepakatan 1993 mengenai prosedur, dan akhirnya kesepakatan mengenai konstitusi sementara termasuk prinsip-prinsip dan prosedur yang mengikat bagi proses penyusunan konstitusi akhir.

Pada April 1994, pemilu nonrasis pertama bagi parlemen dilaksanakan dengan jumlah pemilih sekitar 86 persen. Bulan berikutnya, parlemen baru bertemu untuk pertama kalinya sebagai Majelis Konstitusi.

Pada pertengahan 1990-an, proses Afrika Selatan memperlihatkan penyusunan konstitusi partisipatif dalam skala penuh. Hingga saat itu, masyarakat tidak punya peran langsung dalam pembuatan konstitusi. Sekarang wakil yang mereka pilih dalam majelis menawarkan bantuan untuk mendidik mereka dan menampung pandangan mereka. Upaya pendidikan melibatkan gerakan media dan periklanan dengan menggunakan koran, radio

dan televisi, papan reklame, dan sisi badan bus; Koran majelis dengan sirkulasi sebanyak 160.000; film kartun; Web site; dan pertemuan publik; semua upaya ini menjangkau sekitar 73 persen penduduk. Mulai 1994 hingga 1996, Majelis Konstitusi menerima dua juta masukan dari perorangan, kelompok advokasi, himpunan profesi, dan pihak-pihak berkepentingan lain.

Pada fase akhir, bersamaan dengan gerakan partisipatori, komite majelis merancang sebuah konstitusi baru yang berada dalam parameter dilampirkan ke konstitusi sementara 1994; rancangan kerja pertama diterbitkan pada November 1995, menyisihkan 68 isu untuk dikerjakan lebih lanjut; rancangan revisi diterbitkan tahun berikutnya; dan teks akhir pada Mei 1996. Mulai Juli hingga September 1996, Mahkamah Konstitusi mempelajari kembali teks tersebut; mahkamah kemudian mengembalikan teks tersebut ke majelis untuk diamandemen, yang dilakukan pada Oktober. Pada November, mahkamah memberi sertifikasi akhir dan pada Desember Presiden Mandela menandatangani konstitusi tersebut menjadi undang-undang.

Membangun Dialog dan Kepercayaan

Proses Afrika Selatan memerlukan waktu. Proses itu bertahap. Ia mendapatkan keuntungan dari konstitusi sementara yang membolehkan dialog transisi tetap berlangsung. Partisipasi diminta pada waktu yang telah ditentukan bukan setiap saat dan kemudian kreativitas dan sumber daya dimanfaatkan sepenuhnya untuk memfasilitasi sebuah dialog yang serius. Kepercayaan



Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela, tengah, dan wakil presiden, Thabo Mbeki, kiri dan F.W. de Klerk, kanan, merayakan konstitusi baru, 8 Mei 1996

bahwa hasilnya akan konsisten dengan prinsip-prinsip demokrasi 1994 diciptakan dengan keberlangsungan pembicaraan antara sertifikasi yudisial dan konfirmasi parlemen. Kelompok-kelompok, termasuk perempuan dan pemimpin adat, menemukan suara dan akses dan memastikan bahwa kepentingan mereka diikuti dalam pertimbangan. Hal yang juga penting adalah fakta bahwa Afrika Selatan sebelumnya telah mempunyai masyarakat sipil yang dapat disatukan sebagai pengimbang terhadap pembagian politik yang rasis dan berpihak yang telah begitu mengakar. Faktor penting lain yang menjaga terpeliharanya proses formal adalah kesabaran; khususnya dalam menghadapi kekerasan; kemauan oleh semua pihak terkait untuk melakukan langkah-langkah berani; dan gabungan perundingan secara pribadi mengenai beberapa isu yang paling pelik serta keterlibatan masyarakat yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Partisipasi masyarakat yang murni hanya bisa benar-benar terwujud karena adanya komitmen pada waktu dan sumber daya yang

luar biasa besarnya. Bahkan kalau kita menganggap titik awal Afrika Selatan sebagai masa kesepakatan pada 1991 untuk merundingkan proses tersebut, pembuatan konstitusi dalam kasus yang berhasil secara luar biasa itu memerlukan waktu paling tidak lima tahun. Banyak orang yang mungkin berdalih bahwa proses tersebut sedang berlangsung paling tidak dua tahun sebelumnya, dimulai saat para pemimpin mulai melakukan pendekatan tentatif terhadap pembagian ras; yang pasti, bagian dari proses tersebut adalah pembangunan kepercayaan yang memadai antara kaum elite dan antara masyarakat umum untuk memungkinkan perbincangan konstitusional benar-benar terlaksana.

Bentuk partisipasi sangat beragam, tidak ada satu model yang cocok untuk semua bangsa. Afrika Selatan memilih sebuah parlemen yang berfungsi sebagai Majelis Konstitusi. Afrika Selatan mencari pendapat masyarakat melalui berbagai saluran, menggunakan media secara kreatif, dan meng-

embangkan materi sehingga isu tentang konstitusi dapat diakses dalam banyak bahasa.

Tetapi rakyat tidak dilibatkan secara sama di semua tahapan proses Afrika Selatan dan proses lain. Rakyat Afrika memang dapat mengikuti kemajuan negosiasi publik hingga 1994, beberapa kebuntuan yang benar-benar serius yang terjadi di tengah jalan diselesaikan dalam pertemuan rahasia. Seluruh rakyat untuk pertama kalinya diundang untuk ikut serta dalam pemilu 1994, bentuk partisipasi yang paling konvensional. Tetapi dalam konteks Afrika Selatan, di mana sebagian penduduknya sebelumnya tidak diikutkan atas dasar rasial, hal ini adalah tindakan yang sangat bersejarah. Sekitar 86 persen penduduknya memberikan suara. Jumlah pemberi suara, serta jumlah usulan ke Majelis Konstitusi, menegaskan bahwa rakyat akan berpartisipasi bila mereka melihat isu dan hasilnya adalah sesuatu yang penting.

Vivien Hart adalah guru besar peneliti di University of Sussex, di mana dia sebelumnya menjabat sebagai Direktur the University's Cunliffe Center for the Study of Constitutionalism and National Identity, sebuah jaringan riset internasional yang melibatkan cendekiawan dan aktivis dari Inggris Raya, Eropa, Amerika Serikat, Kanada, Afrika Selatan, Sri Lanka, dan Fiji. Bukunya, Women Making Constitutions, yang diedit bersama dengan Alexandra Dobrowolsky, diterbitkan pada November 2003. Hart adalah peneliti senior di the U.S. Institute of Peace's Jennings Randolph Program for International Peace pada 2002-2003.

Pendapat yang dilukiskan dalam artikel ini adalah pendapat penulis dan tidak mesti mencerminkan pandangan atau kebijakan pemerintah A.S.

Foto di halaman 36: AP/WWP, B.K. Bangash

Konstitusionalisme di Dunia Islam

Perbincangan dengan Noah Feldman

Dalam wawancara ini, guru besar hukum dan ahli Islam Noah Feldman menyampaikann pengalamannya dengan dua proses konstitusional terbaru di dunia. Dia adalah penasihat Departemen Luar Negeri AS mengenai masalah kebebasan beragama dalam perumusan konstitusi Afghanistan. Di Irak, dia adalah penasihat konstitusi senior pada Penguasa Sementara Koalisi dari April sampai Juli 2003. Dia terus memberikan nasihat kepada berbagai anggota Dewan Pemerintahan Irak, dan dia memberi saran pada Perumusan beberapa dokumen konstitusi sementara.

DALAM BUKU ANDA, *After Jihad, America and the Struggle for Islamic Democracy*, Anda memperlihatkan bahwa Islam dan demokrasi itu selaras dan bahwa nilai-nilai Islam dan prinsip demokrasi dapat hidup berdampingan dalam masyarakat yang berhasil. Apa yang membuat Anda sampai ke kesimpulan tersebut?

Dr. Feldman: Ada beberapa isu yang dipertaruhkan di sini. Pertama adalah bahwa sangat banyak orang di dunia Islam mengatakan secara terbuka bahwa mereka percaya demokrasi dan Islam dapat bekerja sama dengan baik. Tentu saja, ada negara-negara Islam yang demokratis dan relatif berhasil dalam demokrasi. Turki adalah contoh yang paling gamblang, tapi kita juga bisa melihat Indonesia atau Banglades sebagai demokrasi yang menemukan pijakannya. Selain itu, telah terjadi reformasi demokrasi belum lama ini di berbagai negara-negara Islam—satu contoh yang paling mencengangkan adalah konstitusi baru di Bahrain.

Pada tingkat praktis, kita melihat bahwa



demokrasi Islam dapat dan bisa muncul, dan pada tingkat teoretis, jumlah cendekiawan dan rakyat biasa yang bertumbuh jumlahnya di dunia Islam memperlihatkan tradisi Islam dan demokrasi itu selaras dan dapat bekerja sama.

Tanya: Bila tiba saatnya untuk mengembangkan konstitusi demokratis di sebuah negara Islam, apakah pertimbangan khusus dan tantangan-tantangan spesifiknya?

Dr. Feldman: Pertama adalah pada tingkat teoretis. Orang harus melihat pendekatan umum bahwa keduanya sebagai hal yang tidak selaras. Sebagian orang berpikir karena dalam Islam Tuhan adalah berdaulat, orang tidak bisa menjadi pembuat keputusan akhir dalam pemerintahan. Mungkin akan ada kesulitan dalam memisahkan kekuasaan politik manusia dengan kedaulatan Tuhan.

Tetapi pada tingkat teoretis, saya pikir adalah mungkin merespons bahwa dalam Islam, meskipun Tuhan berdaulat, hukum

Para peserta Loya Jirga di Afghanistan atau Dewan Agung, mendengarkan delegasi pada hari kedua pertemuan, Desember 2003 di Kabul, Afghanistan. Para tetua Afghanistan berkumpul di Kabul untuk merumuskan konstitusi negara tersebut.

Tuhan masih diinterpretasikan oleh manusia, dan jalannya pemerintahan sehari-hari diselenggarakan oleh manusia, bukan oleh Tuhan. Terlebih lagi, dalam demokrasi kita percaya ada beberapa hak-hak mendasar yang melampaui apa yang orang mungkin atau tidak mungkin pikirkan sebagai hal yang benar pada satu titik tertentu, seperti hak untuk hidup dan bebas.

Kemudian ada proses praktis untuk menetapkan lembaga-lembaga di dalam konstitusi yang akan memediasi antara nilai-nilai Islam dan nilai-nilai demokrasi di mana nilai-nilai itu bagi pengamat dari luar mungkin tampak saling bertentangan.

Afghanistan

Tanya: Di Afghanistan, masalah struktural apa yang dihadapi oleh para penyusun rancangan undang-undang?

Dr. Feldman: Masalah-masalah semacam itu penting dalam setiap proses penulisan konstitusi. Masalah itu tidak secara spesifik berkaitan dengan pertanyaan Islam-demokrasi. Kita bisa mempunyai cabang pemerintahan eksekutif yang kuat di demokrasi Islam atau eksekutif yang lemah. Itu adalah pertanyaan penting untuk semua konstitusi di seluruh dunia.

Apa yang harus mereka tangani di Afghanistan adalah kenyataan bahwa konstitusi menyatakan Islam sebagai agama resmi negara. Tapi ia juga menyatakan negara Afghan adalah negara di mana ada pemilu dan nilai-nilai demokrasi.

Mereka harus menghadapi pertanyaan struktural mengenai kapan menerapkan hukum Islam. Mereka mengajukan sebuah ketentuan dalam konstitusi, yang aslinya muncul dalam konstitusi rumusan Iran 1906, yang menyatakan bahwa hukum yang dibuat oleh manusia tidak boleh bertentangan dengan Islam.

Mereka juga menciptakan mahkamah konstitusi yang dianggap punya kekuasaan untuk bertindak sebagai hakim untuk memutuskan apakah hukum yang dibuat melanggar nilai-nilai Islam. Di sini kita melihat contoh sebuah tempat di mana mereka mengidentifikasi potensi konflik, dan mereka bertindak sebagai hakim untuk memutuskan. Lebih tepatnya, mereka menciptakan sebuah lembaga untuk bertindak sebagai hakim untuk menyelesaikan konflik.

Tanya: Saya paham bahwa pengadilan tinggi adalah berupa kombinasi hakim hukum sekuler dan hakim Islam. Apakah Anda optimis hal tersebut akan berhasil?

Dr. Feldman: Ini adalah sebuah eksperimen. Ada kemungkinan untuk berhasil, namun tentu saja tidak ada jaminannya. Ini adalah sebuah eksperimen dengan sebuah badan yang akan dapat memediasi antara dua perangkat nilai yang berbeda, dan melakukannya dengan cara yang diakui sebagai cara sah oleh semua rakyat Afghanistan.

Tanya: Apakah syariah punya peran lain di bawah konstitusi, di samping di pengadilan tinggi dan pada sisi yang baru saja menjadi acuan Anda yang menyatakan bahwa tidak boleh ada hukum yang diterapkan bertentangan dengan Islam?

Dr. Feldman: Ada jaminan apabila hukum Syariah diterapkan, aliran syariah tertentu yang dianut oleh kalangan tertentu akan dihormati, sehingga tak seorang pun berkewajiban untuk mengikuti cabang Syariah yang bukan menjadi cabang mereka.

Ketentuan ini dijamin dalam konstitusi. Itu mungkin ruang yang paling penting di mana Syariah berperan. Menariknya, tidak ada ketentuan yang mengatakan secara spesifik bahwa Syariah adalah sumber perundang-undangan atau sumber perundangan dalam konstitusi itu.

Tanya: Apakah ada kesengajaan ambiguitas atau perbedaan dalam konstitusi Afghanistan? Misalnya, isu-isu yang tidak dapat diputuskan atau yang tidak bisa dicapai melalui konsensus atau kesepakatan yang akan dibiarkan ke masa depan?

Dr. Feldman: Konstitusi menjamin kesetaraan wanita, tapi tidak membahas pertanyaan apa yang akan terjadi jika beberapa ketentuan tertentu dari hukum Islam dianggap tidak selaras dengan kesetaraan itu.

Mungkin pengadilan hanya akan menginterpretasikan Syariah sebagai egalitarian, dan itu adalah hasil yang mungkin muncul. Isu tersebut tidak dibahas secara eksplisit. Jadi, tentu saja ada semacam perbedaan yang tetap ada di sana. Terserah pada pengadilan konstitusi bagaimana mengatasi masalah ini.

Tanya: Kelompok perempuan menyatakan keprihatinannya bahwa jaminan hak-hak perempuan dalam konstitusi tidak dinyatakan secara kuat seperti yang mereka inginkan.

Dr. Feldman: Ada [jumlah delegasi] tertentu yang dialokasikan untuk perempuan dalam badan pembuat undang-undang, dan pernyataan menjamin kesetaraan perempuan dalam konstitusi. Juga ada jaminan bahwa Afganistan akan mematuhi kewajiban traktat internasional, yang mencakup Konvensi [PBB] tentang Penghapusan Semua Jenis Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).

Semua tersebut di atas adalah tiga jaminan yang cukup kuat, terutama tak satupun tertuang dalam Konstitusi AS. Kami tidak mempunyai perangkat yang dialokasikan untuk perempuan dalam badan pembuat undang-undang. Kami tidak mempunyai pernyataan yang menyebutkan perempuan setara dalam konstitusi kami, kami juga tidak pernah meratifikasi CEDAW. Memang bisa lebih baik, namun saya pikir itu adalah permulaan yang baik bagi Afghanistan.

Irak

Tanya: Sekarang kita beralih ke Irak. Dewan Pemerintahan Irak mengadopsi apa yang disebut “Konstitusi Sementara” pada 8 Maret. Apa yang dikerjakan, dan berapa lama ini akan berlaku?

Dr. Feldman: Apa tugasnya pada prinsipnya adalah membuat sebuah kerangka untuk pemerintahan, pertama selama masa transisi sebelum pemilu Januari 2005 diselenggarakan, juga ia menyediakan kerangka seperti apa bentuk pemerintahan begitu pemilu terlaksana. Dalam realitasnya, ia tetap dipandang apakah konstitusi akan terus berlaku sebagaimana tertulis, atau ia akan diubah. Hingga saat ini, anggota Dewan Pemerintahan telah setuju untuk mematuhinya setelah 30 Juni.

Tanya: Apakah ada indikasi bahwa akan ada banyak tekanan untuk mengubah konstitusi sementara?

Dr. Feldman: Sudah ada tekanan untuk mengubahnya. Pada hari pertama konstitusi itu ditandatangani, pemimpin Syiah Ayatollah Sistani mengatakan bahwa ia punya masalah dengan konstitusi ini. Pemimpin Syiah lain tampaknya juga mempunyai keprihatinan serupa. Keprihatinan yang diutarakan oleh Ayatollah Al Sistani yang dinyatakan dalam suratnya baru-baru ini ke Perwakilan Khusus PBB, Lakhdar Brahimi adalah bahwa presidensi yang terdiri dari tiga orang yang dibentuk oleh Konstitusi Transisi tidak cukup mewakili mayoritas. Dalam suratnya ia menyatakan harapannya bahwa resolusi Dewan Keamanan PBB tidak akan mendukung keseluruhan dokumen yang ada, tetapi akan mengakui bahwa Majelis Nasional punya wewenang untuk mengamandemen dokumen tersebut. Secara khusus ia menyiratkan bahwa ia ingin melihat amandemen pada presidensi tiga orang tersebut.

Tanya: Jadi struktur pemerintahan adalah sistem presidential dan bukan sistem parlementer?

Dr. Feldman: Bukan, struktur pemerintahannya sebenarnya sistem parlementer dengan seorang perdana menteri, dan kemudian presidensi tiga orang yang punya beberapa kekuasaan, beberapa kekuasaan veto, tetapi bukan eksekutif utama.

Tanya: Apa yang dikatakan oleh konstitusi sementara mengenai hak azasi manusia dan kebebasan beragama?

Dr. Feldman: Ia menjamin kebebasan beragama, kebebasan berkeyakinan, kebebasan berpendapat dalam bahasa yang dipinjam dari Deklarasi Universal tentang Hak Azasi Manusia. Ia juga menjabarkan seluruh daftar hak azasi manusia yang dikenal berasal dari dokumen hak azasi manusia internasional: Hak melawan penyiksaan, hak terhadap perlindungan setara dari warga, hak untuk mendapatkan perlindungan diri sebagai haknya, dan sebagainya.

Tanya: Jadi ia hampir mendekati Bill of Human Rights yang lengkap?

Dr. Feldman: Saya bisa menggambarkan sebagai piagam hak azasi manusia (bill of human rights) yang menyeluruh. Konstitusi sementara itu menjamin kesetaraan bagi semua rakyat Irak baik pria atau wanita, tanpa memandang agama atau etnis atau asal negara. Ia merupakan seperangkat hak-hak yang komprehensif, dokumen yang luar biasa dalam masalah hak.

Tanya: Apakah ada peraturan bagi perempuan dalam pemerintahan?

Dr. Feldman: Ada. Hukum Administrasi Transisi menyatakan Majelis Nasional terbentuk sedemikian rupa untuk memastikan bahwa 25 persen perwakilannya pada Majelis Nasional adalah perempuan.” Sekarang, terjadi debat mengenai apakah itu merupakan kuota yang tegas atau apakah itu merupakan target yang diidam-idamkan. Susunan katanya di seputaran itu, tapi saya bisa katakan mendekati ke pernyataan persyaratan bahwa Majelis Nasional harus terdiri dari paling tidak 25 persen perempuan.

Tanya: Apakah Anda memperkirakan akan ada debat publik meluas soal dokumen tersebut?

Dr. Feldman: Ya benar. Dokumen tersebut dirumuskan tanpa partisipasi sebagian besar rakyat. Kita tahu itu adalah kelemahannya. Pertama-tama, akan ada debat tentang karakter hukum transisi itu sendiri. Saya kira akan ada debat yang alot tentang masalah tersebut. Dan kemudian, saya kira akan ada debat lebih jauh soal pertanyaan mengenai aspek apa dari dokumen ini yang sebaiknya diubah atau sebaiknya tetap sama dalam konstitusi permanen kelak yang akan dirumuskan dan disahkan oleh Majelis Nasional.

Tanya: Dalam hal kegiatan politik, apakah konstitusi transisi melarang, seperti halnya dalam konstitusi Afghanistan, partai-partai politik diselenggarakan di sekitar kelompok regional atau etnis?

Dr. Feldman: Tidak, dan juga tidak bisa melakukannya dan tetap konsisten dengan organisasi politik yang berkaitan dengan partai-partai Kurdi. Partai Demokratik Kurdi (the Kurdish Democratic Party) dan Uni Patriot (Patriotic Union) keduanya diselenggarakan di sekitar identitas Kurdi dan berasal dari Kurdistan.

Tanya: Apakah konstitusi di Irak (pada akhirnya) dan di Afghanistan mengalami keberhasilan dan mendorong stabilitas dan kebebasan baru bagi rakyatnya, menurut Anda apa dampaknya terhadap wilayah lain di kawasan itu?

Dr. Feldman: Saya pikir ini akan menjadi perubahan yang melegakan pada ketiadaan kebebasan dan demokrasi di beberapa negara tetangganya. Iran mengalami perkembangan demokrasi yang sangat menjanjikan yang sekarang tampaknya terhambat, dan bila Anda melihat Ulama Syiah di Irak menyerukan keterbukaan, pemilu yang bebas dan Ulama Syiah di Iran menyerukan pemilu terbatas, maka ini akan berpengaruh pada Iran, karena rakyat Iran akan melihat secara lebih jelas apa yang mereka telah lakukan yang ternyata sistem mereka mengalami kegagalan.

Demikian juga, di Saudi Arabia, orang akan melihat melalui layar televisi satelit, publik berdebat mengenai masalah konstitusi yang penting, dan mereka melihat debat semacam itu tidak “membuat orang terpingkal-pingkal”, dan itu akan meningkatkan tekanan untuk keterbukaan dan liberalisasi disana.

Demikian juga di Suriah, saya pikir akan terjadi peningkatan rasa akan perlunya reformasi yang lebih besar dari yang terjadi sebe-

lumnya. Saya pikir ia akan memberi dampak positif di banyak tempat di kawasan tersebut.

Apabila demokrasi gagal di Irak, ia akan berdampak negatif di mana-mana di kawasan itu. Orang yang menyokong liberalisasi dan demokratisasi akan semakin melihat dan berpikir bahwa demokrasi bukanlah struktur pemerintahan yang dapat bertahan hidup di negara-negara yang mayoritas berpenduduk Islam. Itu akan merupakan sesuatu yang sangat memalukan.

Tanya: Pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh orang adalah: “Apa yang terjadi jika para ekstrimis Islam terpilih secara demokratis?” Anda memberikan contoh yang mengkhawatirkan di Aljazair dalam buku Anda.

Dr. Feldman: Saya pikir ada satu hal yang harus jelas soal Aljazair, apapun yang orang ketahui, kalangan Islam bukanlah kelompok yang mendorong negara tersebut ke dalam perang sipil. Kalangan Islam tidak pernah menyatakan mereka akan menghapus demokrasi. Sebaliknya, mereka dengan senang hati berpartisipasi secara demokratis. Mereka tidak pernah mendapat kesempatan untuk membuktikannya dengan satu atau cara lain, karena pemerintahan militer membatalkan pemilu, dan pemerintah militer ini sebenarnya adalah pihak yang menghilangkan kebebasan di negara tersebut.

Saya yakin bahwa pemilu di semua negara Islam, di mana pemilu tersebut cukup bebas pada tahun-tahun belakangan, telah membawa partai-partai Islam bekerja dengan baik. Saya berharap hal yang sama terjadi di Irak, dan hal itu terjadi di Afghanistan.

Itu adalah kecenderungan umum yang kita lihat. Itu tidak berarti bahwa partai-

partai itu akan bertindak secara tidak demokratis. Turki adalah satu contoh di mana partai yang berkuasa bisa dikatakan partai Islam, tapi mereka tidak menampakkan praktik seperti nama yang mereka sandang. Sekularisme resmi Turki mengharuskan mereka untuk tidak bisa seperti itu, tetapi kenyataannya mereka adalah partai Islam. Mereka telah memerintah dengan cara yang sangat demokratis.

Tanya: Jadi, begitu mereka berada di kekuasaan, mereka sepertinya memoderatkan diri mereka?

Dr. Feldman: Di Turki, partai-partai tersebut relatif moderat ketika mereka mencalonkan diri untuk berkuasa. Saya pikir realitas berada dalam demokrasi adalah Anda harus dipilih kembali. Selama Anda merasa harus dipilih kembali, Anda tidak bisa memerintah dalam cara yang akan mengesampingkan bagian besar penduduk. Sebaliknya, di Iran, di mana pemimpin mendapat kekuasaan melalui revolusi, mereka bisa berhasil melepaskan diri tindakan-tindakan opresif, meskipun rakyat sangat menolak mereka. Jelas ada perbedaan yang signifikan antara mencapai kekuasaan dengan cara yang sah dan mencapai kekuasaan dengan cara kekuatan.

Noah Feldman adalah seorang guru besar di the New York University School of Law di New York City. Sebelumnya dia pernah bekerja sebagai panitera di Mahkamah Agung. Dia memperoleh gelar doktor dalam pemikiran Islam dari Oxford University di Inggris sebagai Rhodes Scholar. Dia adalah pengarang buku After Jihad: America and the Struggle for Islamic Democracy. Dia diwawancarai oleh Leslie High.

Pendapat yang dilukiskan dalam artikel ini adalah pendapat penulis dan tidak mesti mencerminkan pandangan atau kebijakan pemerintah A.S.

Foto di halaman 39: AP/WWP, B.K. Bangash

Daftar Pustaka

Bacaan Tambahan tentang Konstitusionalisme

Bailyn, Bernard.

To Begin the World Anew: The Genius and Ambiguities of the American Founders. New York: Alfred K. Knopf, 2003.

Belz, Herman.

A Living Constitution or Fundamental Law? American Constitutionalism in Historic Perspective. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield, 1998.

Berggren, Niclas, et. al., eds.

Why Constitutions Matter. New Brunswick, New Jersey: Transaction Publishers, 2002.

Billias, George Athan, ed.

American Constitutionalism Abroad: Selected Essays in Comparative Constitutional History. New York: Greenwood Press, 1990.

Blaustein, Albert P., ed.

Constitutions That Made History. New York: Paragon House Publishers, 1988.

Chemerinsky, Erwin.

Constitutional Law: Principles and Policies. New York: Aspen Law & Business, 2002.

Faigman, David L.

Laboratory of Justice. New York: Times Books: Henry Holt, 2004.

Feldman, Noah.

After Jihad: America and the Struggle for Islamic Democracy. New York: Farrar, Straus, & Giroux, 2003.

Ferejohn, John et al., eds.

Constitutional Culture and Democratic Rule. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2001.

Finer, S.E. (Samuel Edward), et. al. eds.

Comparing Constitutions. Oxford: Clarendon Press; New York: Oxford University Press, 1995.

Hassen, Ebrahim.

The Soul of a Nation: Constitution-Making in South Africa. Oxford: Oxford University Press, 1998.

Henkin, Louis et. al., eds.

Constitutionalism and Rights: The Influence of the United States Constitution Abroad. New York: Columbia University Press, 1990.

Hoffman, Daniel N.

Our Elusive Constitution: Silences, Paradoxes, Priorities. Albany: State University of New York Press, 1997.

Howard, A.E. Dick.

Democracy's Dawn: A Directory of American Initiatives on Constitutionalism, Democracy, and the Rule of Law in Central and Eastern Europe. Charlottesville, Virginia: University Press of Virginia, 1991.

Jackson, Vicki C., et al. eds.

Defining the Field of Comparative Constitutional Law. Westport, Connecticut: Praeger, 2002.

Kaplin, William A.

American Constitutional Law: An Overview, Analysis, and Synthesis Durham, North Carolina: Carolina Academic Press, 2004.

Knock, Thomas, J.

To End All Wars: Woodrow Wilson and the Quest for a New World Order. Oxford: Oxford University Press, 1992.

Levin, Daniel Lessard.

Representing Popular Sovereignty: The Constitution in American Political Culture. Albany: State University of New York Press, 1999.

McHugh, James T.

Comparative Constitutional Traditions. New York: Lang, Peter Publishing, 2002.

McNelly, Theodore.

The Origins of Japan's Democratic Constitution. Lanham, Maryland: University Press of America, 2000.

Powell, Jefferson. A.

Community Built on Words: The Constitution in History and Politics. Chicago : University of Chicago Press, 2002.

Quinn, Frederick.

Democracy At Dawn: Notes From Poland and Points East. College Station, Texas: Texas A&M University Press, 1998.

Schwartz, Herman.

The Struggle for Constitutional Justice in Post-Communist Europe. Chicago: University of Chicago Press, 1999.

Seidman, Louis Michael.

Our Unsettled Constitution: A New Defense of Constitutionalism and Judicial Review. New Haven, Connecticut: Yale University Press, 2001.

Siegan, Bernard H.

Drafting a Constitution for a Nation or Republic Emerging Into Freedom, 2nd edition. Fairfax, Virginia: George Mason University Press, 1994.

Sunstein, Cass R.

Designing Democracy: What Constitutions Do. New York: Oxford University Press, 2001.

Teitel, Ruti G.

Transitional Justice. Oxford ; New York: Oxford University Press, 2000.

Situs-Situs tentang Konstitusionalisme

Sumber-sumber internet mulai aktif sejak Maret 2004. Departemen Luar Negeri AS tidak bertanggung jawab atas situs-situs tersebut yang alamatnya telah mengalami perubahan dan/atau situs yang sekarang menayangkan materi yang tidak tepat.

ABA: Central European and Eurasian Law Initiative

<http://www.abanet.org/ceeli/home.html>

Proyek layanan publik American Bar Association untuk memajukan penegakan hukum dengan mendukung proses reformasi hukum di Eropa Timur dan negara-negara merdeka baru dari bekas Uni Soviet

Charters of Freedom

http://www.archives.gov/national_archives_experience/constitution.html

Penyampaian online Konstitusi AS yang disajikan oleh Arsip Nasional AS.

Comparative Constitutional Law Guide

<http://www.georgetown.edu/intl/guides/compcon/print.html>

Dibuat oleh Perpustakaan Hukum Georgetown University

Comparing Constitutional and International Constitutional Law, A Primer

<http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/compcons.html>

The Constitution Finder

<http://www.confunder.richmond.edu/>

Links ke konstitusi sebagian besar negara, dalam berbagai bahasa dan bahasa Inggris.

The Constitution of the United States

<http://www.law.emory.edu/FEDERAL/usconst.html>
<http://www.thisnation.com/constitution.html>

Constitutional Law: An Overview

<http://www.cornell.edu/topics/constitution.html>

Esai deskriptif mengenai hukum konstitusi dengan link ke Undang-Undang AS dan sumber-sumber lain.

Constitution & Legal Policy Institute (COLPI)

<http://www.osi.hu/colpi/indexe.htm>

COLPI mendukung reformasi hukum demokrasi di negara-negara Eropa Timur, Asia Tengah, dan Mongolia

International Journal of Constitutional Law

<http://www3.oup.co.uk/jnls/list/ijclaw/default.html>

Didirikan pada 2003, menyajikan beasiswa hukum saat ini dari komunitas internasional

The National Constitution Center in Philadelphia

<http://www.constitutioncenter.org>

Sebuah museum baru di Philadelphia yang menjelaskan Konstitusi, mendorong partisipasi warga dan menyediakan sumber-sumber pendidikan.

Researching Constitutional Law on the Internet

<http://www.lib.uchicago.edu/~llou/conlaw.html>

Sebuah bibliografi berbasis Web yang komprehensif

U.S. Constitution Online

<http://www.usconstitution.net>

Dirancang untuk penggunaan oleh siswa sekolah menengah atas

U.S. Institute of Peace: Constitution-Making Web Links

<http://www.usip.org/library/tupics/constitution.html>

Links ini melengkapi Institute's Rule of Law Program dan proyeknya tentang Pembuatan Konstitusi, Pembangunan Perdamaian, dan Rekonsiliasi Nasional. Beberapa Pilihan Sekolah Hukum di AS.

Columbia University

<http://www.lawschool.columbia.edu>

Cornell University

<http://www.lawschool.cornell.edu>

Harvard University

<http://www.law.harvard.edu>

New York University

<http://www.law.nyu.edu>

Stanford University

<http://www.law.stanford.edu>

University of Chicago

<http://www.law.uchicago.edu>

University of Michigan Ann Arbor

<http://www.law.umich.edu>

University of Pennsylvania

<http://www.law.upenn.edu>

University of Virginia

<http://www.law.virginia.edu>

Yale University

<http://www.law.yale.edu>

Terbitan yang tersedia untuk publik di
Dinas Penerangan dan Kebudayaan, Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta:

Jurnal Elektronik dalam bahasa Indonesia dan Inggris:

- 1) Seeking Free and Responsible Media, 2) Journalism Ethics: The Global Debate,
- 3) State and Local Government, 4) The Supreme Court of The United States,
- 5) Who We Are Today, 6) Working for Women Worldwide,
- 7) Protecting the Environment, 8) Constitutionalism and Emerging Democracies,
- 9) Responses to Human Trafficking, 10) Ending Abusive Child Labor,
- 11) American Teenagers, 12) American Internationalism,
- 13) International Development Goals.

Buku dan pamflet dalam bahasa Indonesia:

- 1) Amerika Baru Yang Religius, 2) Islam di Amerika, 3) Memperkuat Negara,
- 4) Presiden-Presiden Amerika Serikat, 5) Apakah Ekonomi Pasar Itu?,
- 6) Seri Garis Besar Amerika (Sejarah, Ekonomi, Geografi, Pemerintahan, Kesusasteraan),
- 7) Pers Tak Terbelenggu, 8) Demokrasi, 9) Apakah Demokrasi Itu,
- 10) Elemen-Elemen Jurnalisme

Bagi yang berminat untuk mendapatkan terbitan di atas secara cuma-cuma, silakan menghubungi:

Dinas Penerangan dan Kebudayaan, Kedutaan Besar Amerika Serikat

Jl. Medan Merdeka Selatan, No.3-5

Jakarta Pusat

Tel. 021-3435-9559/ 3435-9150

Fax: 021-381-0243

E-mail: request@usembassyjakarta.org



[HTTP://USINFO.STATE.GOV/JOURNALS.HTM](http://usinfo.state.gov/journals.htm)

U.S DEPARTMENT OF STATE / BUREAU OF INTERNATIONAL INFORMATION PROGRAMS

Tanda persahabatan dari rakyat Amerika